

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Literatur**

Pada bagian tinjauan literatur akan memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian, berikut lima penelitian dengan tingkat kesamaan yang cukup tinggi, namun tetap terdapat perbedaan baik dari konsep, teori ataupun studi empiris;

*Political and Institutional Constraints on Green Finance in Indonesia* oleh James Guild merupakan publikasi di *Journal of Sustainable Finance & Investment* pada 3 Januari 2020. Jurnal ini membahas bagaimana Indonesia memiliki potensi tinggi dalam *green finance* dengan permintaan pembangunan infrastruktur tinggi. Permasalahan terletak pada pola regulasi yang kompleks dan kurangnya transparansi implementasi proyek terhadap investor. Sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam membentuk *climate investment risk* menjadikan Indonesia moda *green investment* yang beresiko bagi investor, seringkali berasal dari negara Barat. Di sisi lain, struktur institusional yang mengunggulkan BUMN menjadikan sektor privat sulit berkompetisi di pasar, lebih lagi ditambah dengan keterkaitan pribadi beberapa pejabat pusat dengan perusahaan energi non-terbarukan yang menyulitkan implementasi kebijakan ramah lingkungan.

Penelitian ini memiliki persamaan yang cukup tinggi, baik dari konsep *green finance*, kemudian hambatan nasional Indonesia dalam menerapkan kerangka ekonomi berkelanjutan. Namun penelitian ini tidak secara spesifik menggunakan teori *global governance* dalam menjelaskan konsep penerimaan investasi hijau di Indonesia, serta tidak terfokus pada permasalahan hilirisasi minerba

*It takes two to dance: Institutional dynamics and climate-related financial policies* oleh Moritz Baer, Emanuele Campiglio dan Jérôme Deyris merupakan publikasi jurnal *Ecological Economics* di tahun 2021. Tulisan ini membahas

bagaimana dinamika institusi dapat mempengaruhi kebijakan finansial yang berkaitan dengan perubahan iklim. Kerangka tulisan jurnal ini menyangkut tiga dimensi yang saling berkaitan: tujuan dari penerapan kebijakan (tulus atau komersil); instrumen kebijakan (*informational*, *incentive-based*, atau *quantity-based*); dan pihak berwajib yang menyelenggarakan (terpolitisasi atau berbentuk perwakilan). Jurnal ini menerapkan beberapa studi kasus dalam kerangka pemikrannya, khususnya wilayah Eropa. Di akhir kesimpulan, kerjasama erat antara pihak politik dan pihak berwenang terkait harus dibentuk agar kebijakan lingkungan sektor publik tidak bertabrakan dengan kepentingan negara. Penelitian ini spesifik berbicara mengenai peranan institusi internasional dalam upaya mengembangkan kerangka *green finance*. Namun tulisan ini tidak membahas mengenai ]/dan mengkaji adanya *earth system governance* yang mungkin terbentuk. Manuskrip buku ini melansir, secara akademis, pembahasan perkembangan *green transformation* dan untung-ruginya perlu penggabungan sudut pandang dari berbagai disiplin, seperti hubungan internasional, ekologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Penelitian ini berfokus pada politik pada penerapan ekonomi berkelanjutan dan proses *greem transformation*. Penelitian ini pula mengkonfirmasi peran sentral daripada institusi internasional, namun tidak secara spesifik berbicara bagaimana teori *global governance* menjelaskan fenomena interaksi antar aktor internasional merumuskan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini pun tidak secara spesifik menyoroti Indonesia dalam studi kasusnya.

*Higher cost of finance exarcebates a climate investment trap in developing economies* merupakan artikel kuantitatif Nadia Ameli et al. untuk menggambarkan bagaimana angka kebutuhan finansial untuk membiayai riset, pembentukan dan distribusi sumber energi terbarukan akan lebih berat di negara berkembang dan pada akhirnya menembus batas biaya yang bisa mereka bayar. *Green finance, economy, investment* maupun kebijakan politik-ekonomi lain yang berdasarkan ‘hijau’ utamanya akan menguntungkan negara investor, yang seringkali merupakan negara maju dari Barat; meski secara paradoks, negara

berkembanglah yang akan terkena dampak paling besar dari perubahan iklim, dengan kondisi geografis dan sosial-ekonominya. Penelitian ini pula memiliki kesamaan yang cukup tinggi, utamanya perihal hambatan pada negara berkembang dalam mengelola ekonomi nasionalnya di tengah agenda lingkungan. Namun konsep *economic nationalism* tidak dipakai secara spesifik serta tidak terfokus pada studi kasus hilirisasi minerba di Indonesia.

*Why Is Green Finance Important?* Oleh Jeffrey D. Sachs, Wing Thye Woo, Naoyuki Yoshino, dan Farhad Taghizadeh-Hesary pada tahun 2019 ini membahas Penelitian menggarisbawahi bahwa investasi global dalam energi terbarukan dan efisiensi energi telah menurun, sehingga menimbulkan ancaman terhadap upaya ekspansi *green projects*. Institusi keuangan menunjukkan minat yang lebih besar terhadap proyek-proyek bahan bakar fosil terutama karena masih terdapat beberapa risiko yang terkait dengan teknologi baru ini dan menawarkan tingkat pengembalian yang lebih rendah., sehingga menyoroti perlunya instrumen dan kebijakan keuangan baru untuk meningkatkan pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Skema penetapan harga karbon sedang diterapkan di banyak negara, namun tantangannya adalah mengidentifikasi proyek yang tepat, melibatkan sektor publik dan swasta, dan menyusun pembiayaan. Investasi besar-besaran diperlukan dalam sistem energi hijau, kendaraan listrik, proyek air dan sanitasi, serta sistem kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan pembangunan. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas terkait bagaimana peran lembaga internasional mempengaruhi negara dalam berperilaku utamanya dalam merespon agenda lingkungan. Tidak membahas studi kasus di mana Indonesia sedang membangun proyek hilirisasi minerba, kemudian bertentangan dengan agenda lingkungan.

Sebagai upaya memperkuat kebaruaran dari penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan 77 pembandingan yang tercantum pada table berikut:

NO .	Judul Literatur	Penulis, Tahun	Core-Subject	Rangkuman	Gap-Spotting
1	Investment in renewable energy and electricity output: Role of green finance, environmental tax, and geopolitical risk: Empirical evidence from China	(Abbas et al., 2023)	<i>Green Finance</i>	<p>Penelitian ini menyoroti pentingnya energi terbarukan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB, khususnya dalam memerangi tantangan perubahan iklim. <i>Green finance</i> (GF) diidentifikasi sebagai alat kunci dalam mempromosikan investasi energi terbarukan, dengan Tiongkok menjadi pasar obligasi hijau terkemuka. Namun, tantangan yang dihadapi dalam investasi energi terbarukan termasuk dampak negatif pandemi COVID-19 dan penurunan investasi selama periode 2018-2019, dengan risiko geopolitik (GPR) juga memainkan peran dalam mempengaruhi harga energi dan pasar saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green financing dan environmental tax memiliki pengaruh signifikan terhadap sumber energi terbarukan, namun risiko geopolitik secara signifikan menghambat proyek-proyek tersebut, sementara investasi energi terbarukan (IRE) secara signifikan meningkatkan produksi listrik perusahaan energi di China.</p>	<p>Menunjukkan bahwa kerangka <i>green finance</i> dapat terbukti berpengaruh dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan di China. Namun penelitian ini secara teoritis tidak menggambarkan bagaimana kemudian upaya nasional China dalam mempertahankan <i>resource nationalism</i> seperti yang sedang dihadapi Indonesia dengan hilirisasi mineralnya ditengah upaya menarik investasi hijau.</p>
2	Green growth, degrowth, and the commons"	(Jakob & Edenhoferr, 2014)	Ekonomi politik Internasional	<p>Perdebatan mengenai lingkungan hidup saat ini sering kali berpusat pada pencapaian "green growth" atau "degrowth," yang keduanya mengandalkan</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dalam konsep <i>resource nationalism</i> dan menerapkan</p>

				<p>pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran. penelitian ini berpendapat bahwa fokus tersebut menyesatkan dan mengusulkan kerangka kerja baru. Ketimbang pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial harus menjadi perhatian utama. Dalam penelitian ini pun menyoroti pentingnya mengelola berbagai sumber daya bersama, yang disebut sebagai “commons”, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menekankan perlunya “welfare diagnostics” yang mempertimbangkan berbagai perspektif dan sifat kesejahteraan sosial yang beragam. Sebagai penutup, dalam penelitian ini menyarankan bahwa mengelola “commons” ini dilakukan bersama secara efektif, yang mencakup sumber daya alam dan infrastruktur publik, merupakan fungsi penting dari kebijakan publik.</p>	<p>prinsip-prinsip dasar <i>economic nationalism</i>. Namun penelitian ini tidak secara gamblang menjelaskan bagaimana tatanan rezim internasional mempengaruhi perilaku negara, utamanya dalam perumusan kebijakan terkait perubahan iklim yang kemudian ”menghambat” agenda nasional.</p>
3	Impact of green finance and environmental protection on green economic recovery in South Asian economies: mediating role of FinTech	(Zhang, 2023)	<i>Green Finance</i>	<p>Penelitian ini mengkaji hubungan antara keuangan ramah lingkungan, teknologi keuangan (FinTech), dan pembangunan ekonomi berkualitas tinggi dengan menggunakan data dari tiga negara Asia Selatan (India, Bangladesh, dan Pakistan) antara tahun 2000 dan 2018. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa India, Bangladesh, dan Pakistan telah menerapkan berbagai inisiatif pembiayaan ramah lingkungan, yang</p>	<p>Konsep ekonomi berkelanjutan terbukti berhasil menurunkan emisi CO2 di Bangladesh, India dan Pakistan. Menegaskan bahwa kerangka kerja ekonomi hijau berhasil menurunkan tingkat emisi. Namun penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana <i>economic nationalism</i> berperan dan</p>

				<p>menghasilkan penurunan emisi CO2 komersial secara signifikan selama periode peninjauan. Hal ini mendukung perluasan perlindungan lingkungan dan menegaskan pemulihan ekonomi hijau. Perkembangan FinTech juga berkontribusi dalam mengurangi emisi CO2, sehingga memberikan kontribusi yang baik terhadap pembangunan ekonomi ramah lingkungan. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia Selatan terpilih berada pada jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin dunia dalam penerapan strategi keuangan ramah lingkungan, dan pihak berwenang harus mempercepat pengembangan pemulihan dan layanan ramah lingkungan serta memperkuat kemampuan lembaga perbankan untuk memberikan pinjaman ramah lingkungan</p>	<p>terdapat perbedaan aktor, dimana dalam penelitian ini tidak menyinggung perihal aktifitas tambang di Indonesia.</p>
4	<p>Evaluating the Factors of Green Finance to Achieve Carbon Peak and Carbon Neutrality Targets in China: A Delphi and Fuzzy AHP Approach</p>	<p>(Li et al., 2023)</p>	<p><i>Green Finance</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan Delphi dan Fuzzy AHP (Analytical Hierarchical Process) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengprioritaskan faktor-faktor green finance (GF) dalam mencapai target puncak karbon dan netralitas karbon di China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi (ECF), politik (POF), dan lingkungan (ENF) adalah faktor-faktor yang paling cocok untuk</p>	<p><i>Green finance</i> kembali terbukti mengentaskan permasalahan ekonomi dalam isu perubahan iklim. Namun penelitian ini tidak menyoroti bagaimana <i>resource nationalism</i> mempengaruhi proses penerapan green finance dan tidak menyoroti aktifitas tambang di Indonesia.</p>

				<p>pengembangan GF di China, dengan sub-faktor utama meliputi identifikasi ekologi dan politik, stabilitas politik, dan komitmen iklim. GF didorong untuk mengurangi emisi CO2 dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun diperlukan kebijakan yang substansial untuk mempromosikan GF dan membutuhkan keterlibatan publik yang efisien dalam perilaku hijau.</p>	
5	<p>Race Towards Environmental Sustainability in the G-20 Countries: Do Green Finance and Political Stability Play a Crucial Role</p>	<p>(Çitil et al., 2022)</p>	<p><i>Green finance</i></p>	<p>Tulisan ini membahas mengenai dampak konsumsi dan produksi terhadap lingkungan dan kualitas udara, dengan menekankan perlunya kelestarian lingkungan, serta menyoroti peran kualitas kelembagaan dan stabilitas politik dalam mencapai keberlanjutan. Peneliti menggunakan model regresi kuantil untuk menguji pengaruh keuangan ramah lingkungan, kualitas kelembagaan, dan stabilitas politik terhadap kualitas udara di negara-negara G-20 dari tahun 2004 hingga 2020. Termasuk variabel seperti emisi karbon, PDB, investasi ramah lingkungan, konsumsi energi, dan kualitas kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa keuangan ramah lingkungan, kualitas kelembagaan, dan stabilitas politik berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan, sementara</p>	<p>Secara prinsip, penelitian ini menyinggung perihal kelembagaan, yang mana menjadi dasar dari <i>global governance</i>, khususnya poin legitimasi dan otoritas. Namun penelitian ini tidak menyinggung perihal <i>economic nationalism</i> yang menjadi tantangan di Indonesia melalui aktifitas hilirisasi minerba.</p>

				<p>pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi memberikan dampak negatif. Uji kausalitas panel menegaskan bahwa semua regressor dapat memprediksi kelestarian lingkungan di negara-negara G-20. Penelitian ini merekomendasikan tindakan kebijakan seperti mendorong energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan memperkuat struktur kelembagaan yang kuat.</p>	
6.	Spillover Effects of Green Finance on Attaining Sustainable Development: Spatial Durbin Model	(Kwilinski et al., 2023)	<i>Green Finance</i>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa green finance memainkan peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di seluruh negara EU, dengan menggunakan SDG index sebagai variabel penjelas, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, dampak green finance terhadap pembangunan berkelanjutan bervariasi berdasarkan wilayah di dalam EU. Penulis pun menyarankan untuk mengadopsi strategi yang sesuai dengan kekuatan yang ada di setiap wilayah, sambil mengurangi hambatan yang mungkin menghambat adopsi inisiatif green finance, kerjasama lintas batas antar wilayah EU direkomendasikan untuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman terkait green finance.</p>	<p>Penelitian ini menyoroti peranan institusi internasional dan green finance dalam mekanisme penerapan SDG's di Uni Eropa. Penelitian ini pun menggarisbawahi perhal perbedaan kondisi tiap negara mempengaruhi proses dan output daripada penerapan kerangka <i>green finance</i>. Namun penelitian tidak menyoroti perhal perkembangan hilirisasi minerba di Indonesia.</p>
7.	Distribution of Authority for Mining Business	(Cakranegara et al., 2023)	Hilirisasi Minerba	<p>Studi ini menemukan bahwa UU Minerba tahun 2009 mengalihkan kewenangan pemberian izin pertambangan dari</p>	<p>Penelitian ini spesifik berbicara perkembangan UU Minerba di Indonesia. Namun</p>

	Permits between the Central Government and Regional Governments After the Enactment of the Minerba Law Number 4 of 2009			pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sehingga menimbulkan konflik di dalam pemerintah daerah. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan penggunaan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi pemberian izin pertambangan dapat menyebabkan korupsi negara dan oligarki pengusaha pertambangan. Namun, pemerintah juga mengusulkan dua pendekatan untuk memitigasi masalah ini: melalui pendekatan sektor hilir pertambangan dan pendekatan fiskal, yang secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan kerja dan mensubsidi pendidikan dan usaha kecil.	tidak secara spesifik berbicara terkait perkembangan ekonomi berkelanjutan, <i>green investment</i> , maupun aspek lingkungan lainnya dalam konteks perubahan iklim.
8.	<i>Political and Institutional Constraints on Green Finance in Indonesia</i>	(Guild, 2020)	<i>Green finance</i>	Jurnal ini membahas bagaimana Indonesia memiliki potensi tinggi dalam <i>green finance</i> dengan permintaan pembangunan infrastruktur tinggi. Permasalahan terletak pada pola regulasi yang kompleks dan kurangnya transparansi implementasi proyek terhadap investor. Sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam membentuk <i>climate investment risk</i> menjadikan Indonesia moda <i>green investment</i> yang beresiko bagi investor, seringkali berasal dari negara Barat. Di sisi lain, struktur institusional yang mengunggulkan BUMN	Penelitian ini memiliki persamaan yang cukup tinggi, baik dari konsep <i>green finance</i> , kemudian hambatan nasional Indonesia dalam menerapkan kerangka ekonomi berkelanjutan. Namun penelitian ini tidak secara spesifik menggunakan teori <i>global governance</i> dalam menjelaskan konsep penerimaan investasi hijau di Indonesia, serta tidak terfokus pada permasalahan hilirisasi minerba

				menjadikan sektor privat sulit berkompetisi di pasar, lebih lagi ditambah dengan keterkaitan pribadi beberapa pejabat pusat dengan perusahaan energi non-terbarukan yang menyulitkan implementasi kebijakan ramah lingkungan.	
9.	<i>The social and ecological costs of reforestation. Territorialization and industrialization of land use accompany forest</i>	(Pichler et al., 2021)	<i>Ecology</i>	Tulisan ini membahas bagaimana kebijakan lingkungan yang berhubungan dengan REDD+, baik itu deforestasi dan reforestasi yang ditekankan di <i>Global South</i> akan berdampak secara sosial kepada warga di sekitarnya, termasuk relokasi dengan adanya pemindahan lahan. Tulisan ini membahas bagaimana kebijakan lingkungan yang berkaitan dengan transisi kehutanan akan memiliki dampak sosio-ekologis bagi warga di sekitarnya.	Tulisan ini berfokus pada bagaimana dampak ekologis dari reforestasi dan teritorialisasi, yang menjadi penghambat dari penerapan ekonomi berkelanjutan, atau lebih luasnya adalah memperburuk upaya pengentasan perubahan iklim. Tulisan ini tidak membahas kerangka kerja ekonomi berkelanjutan secara spesifik, dan tidak membahas tantangan pertambangan dalam menarik investasi hijau di Indonesia
10.	<i>It takes two to dance: Institutional dynamics and climate-related financial policies</i>	(Baer et al., 2021)	Institusi Internasional	Tulisan ini membahas bagaimana dinamika institusi dapat mempengaruhi kebijakan finansial yang berkaitan dengan perubahan iklim. Kerangka tulisan jurnal ini menyangkut tiga dimensi yang saling berkaitan: tujuan dari penerapan kebijakan (tulus atau komersil); instrumen kebijakan ( <i>informational</i> , <i>incentive-based</i> , atau <i>quantity-based</i> ); dan pihak	Penelitian ini spesifik berbicara mengenai peranan institusi internasional dalam upaya mengembangkan kerangka <i>green finance</i> . Namun tulisan ini tidak membahas mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menegakkan prinsip

				berwajib yang menyelenggarakan (terpolitisasi atau berbentuk perwakilan). Jurnal ini menerapkan beberapa studi kasus dalam kerangka pemikrannya, khususnya wilayah Eropa. Di akhir kesimpulan, kerjasama erat antara pihak politik dan pihak berwenang terkait harus dibentuk agar kebijakan lingkungan sektor publik tidak bertabrakan dengan kepentingan negara.	ekonomi berkelanjutan dalam aktifitas tambang.
11.	<i>The Politics of Green Transformations</i>	(Scoones et al., 2015)	<i>Green Transformations</i>	membahas fenomena pergeseran fokus politik mulai ke arah lingkungan, menggantikan perspektif antroposentris (berfokus pada manusia) yang biasanya menjadi fokus politik dan mengkaji adanya <i>earth system governance</i> yang mungkin terbentuk. Manuskrip buku ini melansir, secara akademis, pembahasan perkembangan <i>green transformation</i> dan untung-ruginya perlu penggabungan sudut pandang dari berbagai disiplin, seperti hubungan internasional, ekologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, ilmu politik, dan lain sebagainya.	Penelitian ini berfokus pada politik pada penerapan ekonomi berkelanjutan dan proses <i>greem transformation</i> . Penelitian ini pula mengkonfirmasi peran sentral daripada institusi internasional, namun tidak secara spesifik berbicara bagaimana teori <i>global governance</i> menjelaskan fenomena interaksi antar aktor internasional merumuskan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini pun tidak secara spesifik menyoroti Indonesia dalam studi kasusnya.
12.	<i>Higher cost of finance exacerbates a climate investment trap in</i>	(Ameli et al., 2021)	<i>Green investment</i>	menggambarkan bagaimana angka kebutuhan finansial untuk membiayai riset, pembentukan dan distribusi sumber energi terbarukan akan lebih berat di negara	Penelitian ini pula memiliki kesamaan yang cukup tinggi, utamanya perihal hambatan pada negara berkembang dalam mengelola

	<i>developing economies</i>			berkembang dan pada akhirnya menembus batas biaya yang bisa mereka bayar. <i>Green finance, economy, investment</i> maupun kebijakan politik-ekonomi lain yang berdasarkan ‘hijau’ utamanya akan menguntungkan negara investor, yang seringkali merupakan negara maju dari Barat; meski secara paradoks, negara berkembanglah yang akan terkena dampak paling besar dari perubahan iklim, dengan kondisi geografis dan sosial-ekonominya.	ekonomi nasionalnya ditengah agenda lingkungan. Namun konsep <i>economic nationalism</i> tidak dipakai secara spesifik serta tidak terfokus pada studi kasus hilirisasi minerba di Indonesia.
13.	<i>e-Thekwini's Green and Ecological Infrastructure Policy Landscape: Towards a Deeper Understanding</i>	(Meissner, 2021).	<i>Green finance</i>	Umum membahas perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan isu ekologis dan dinamikanya dengan lanskap infrastruktur. Pada Bab 2, Missner membentuk kerangka penelitian bernama PULSE <sup>3</sup> sebagai alat analitik peneliti dalam membentuk tolak ukur kebijakan, program dan strategi lingkungan berdasarkan dasar teoretis dan paradigmatismya. PULSE <sup>3</sup> merupakan akronim dari People Understanding and Living in a Sustained Environment, dan melihat isu kebijakan publik yang berkaitan dengan lingkungan berdasarkan lima paradigma penelitian, dan beberapa perspektif teori untuk membentuk mekanisme kausal dan membedakannya dengan teori besar <i>problem solving</i> ,	Tulisan ini mengkonfirmasi peran <i>green finance</i> dalam mempercepat dan meringankan penerapan ekonomi berkelanjutan dalam sektor industri. Namun penelitian ini tidak terfokus pada studi kasus Indonesia. Terlebih tidak ada mekanisme rezim internasional dalam proses penerapan ekonomi berkelanjutan dan investasi hijau.
14.	Why Is Green	(Sachs et al., 2017)	<i>Green Finance</i>	Penelitian menggarisbawahi bahwa	Penelitian ini tidak secara spesifik

	Finance Important?			<p>investasi global dalam energi terbarukan dan efisiensi energi telah menurun, sehingga menimbulkan ancaman terhadap upaya ekspansi <i>green projects</i>. institusi keuangan menunjukkan minat yang lebih besar terhadap proyek-proyek bahan bakar fosil terutama karena masih terdapat beberapa risiko yang terkait dengan teknologi baru ini dan menawarkan tingkat pengembalian yang lebih rendah., sehingga menyoroti perlunya instrumen dan kebijakan keuangan baru untuk meningkatkan pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Skema penetapan harga karbon sedang diterapkan di banyak negara, namun tantangannya adalah mengidentifikasi proyek yang tepat, melibatkan sektor publik dan swasta, dan menyusun pembiayaan. Investasi besar-besaran diperlukan dalam sistem energi hijau, kendaraan listrik, proyek air dan sanitasi, serta sistem kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan pembangunan</p>	<p>membahas terkait bagaimana peran lembaga internasional mempengaruhi negara dalam berperilaku utamanya dalam merespon agenda lingkungan. Tidak membahas studi kasus dimana Indonesia sedang membangun proyek hilirisasi minerba, kemudian bertentangan dengan agenda lingkungan.</p>
15.	The Relevance of Cultural Diversity in Ethical and Green Finance	(Borbély, 2017)	<i>Green Finance</i>	<p>Boberly berbicara mengenai <i>ethics</i> dalam lingkup <i>green finance</i>. Boberly menggunakan metode Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program (GLOBE) dalam mengidentifikasi perbedaan budaya dalam</p>	<p>Dalam penelitian terdapat temuan yang sejalan dengan penelitian penulis, dimana permasalahan setiap negara atau wilayah tidak bisa diselaraskan dalam menyusun strategi green</p>

				<p>pengaplikasian prinsip finansial pada banyak negara. Dimensi GLOBE yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok budaya dapat membantu menganalisis karakteristik budaya yang berbeda dan kepekaannya terhadap bentuk keuangan etis tradisional. GLOBE mengukur beberapa hal yakni orientasi kinerja, ketegasan, orientasi masa depan, orientasi kemanusiaan, kolektivisme institusional, kolektivisme dalam kelompok, egalitarianisme gender, jarak kekuasaan, dan penghindaran ketidakpastian. Strategi pengelompokan GLOBE juga dapat mengungkap klaster mana yang lebih peduli terhadap permasalahan sosial dan mana yang lebih tertarik pada isu lingkungan.</p>	<p>finance, dalam penelitian Boberly dititikberatkan pada permasalahan budaya dalam konteks sosio-ekonomi. Namun dalam penelitian Boberly tidak secara spesifik berbicara green investment, dan studi kasus hilirisasi minerba Indonesia.</p>
16.	Towards a New Political Economy of Climate Change and Development	(Tanner & Allouche, 2011)	Ekonomi Politik Internasional	<p>Para penulis mengusulkan ekonomi politik baru mengenai perubahan iklim dan pembangunan yang mempertimbangkan peran gagasan, kekuasaan, dan sumber daya dalam membentuk kebijakan dan hasil. Mereka menekankan perlunya untuk melampaui pendekatan tradisional dan mempertimbangkan peran gagasan, kekuasaan, dan sumber daya dalam proses dan hasil kebijakan. Para penulis berpendapat bahwa pendekatan ekonomi politik akan membantu membongkar pendekatan teknosentris dan manajerial terhadap perubahan iklim, dan meningkatkan pemahaman</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada bagaimana ekonomi politik seharusnya memandang fenomena perubahan iklim. Namun tidak banyak berbicara bagaimana kontestasi negara, utamanya negara berkembang seperti Indonesia dalam meningkatkan green investment.</p>

				tentang pengambilan keputusan, proses kebijakan, dan hubungan kekuasaan dalam mengatasi perubahan iklim.	
17.	Race Towards Environmental Sustainability in the G-20 Countries: Do Green Finance and Political Stability Play a Crucial Role	Mücahit Çitil, Metin Ilbasmis, Victoria Olushola Olanrewaju, Abdulkadir Barut, Sadık Karaoğlan, Muhammad Ali, 2022.	<i>Green finance</i>	Tulisan ini membahas mengenai dampak konsumsi dan produksi terhadap lingkungan dan kualitas udara, dengan menekankan perlunya kelestarian lingkungan, serta menyoroti peran kualitas kelembagaan dan stabilitas politik dalam mencapai keberlanjutan. Peneliti menggunakan model regresi kuantil untuk menguji pengaruh keuangan ramah lingkungan, kualitas kelembagaan, dan stabilitas politik terhadap kualitas udara di negara-negara G-20 dari tahun 2004 hingga 2020. Termasuk variabel seperti emisi karbon, PDB, investasi ramah lingkungan, konsumsi energi, dan kualitas kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa keuangan ramah lingkungan, kualitas kelembagaan, dan stabilitas politik berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan, sementara pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi memberikan dampak negatif. Uji kausalitas panel menegaskan bahwa semua regressor dapat memprediksi kelestarian lingkungan di negara-negara G-20. Penelitian ini merekomendasikan tindakan kebijakan seperti	Penelitian ini berfokus pada bagaimana ekonomi politik seharusnya memandang fenomena perubahan iklim. Namun tidak banyak berbicara bagaimana kontestasi negara, utamanya negara berkembang seperti Indonesia dalam meningkatkan green investment.

				mendorong energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan memperkuat struktur kelembagaan yang kuat.	
18.	Spillover Effects of Green Finance on Attaining Sustainable Development: Spatial Durbin Model	Aleksy Kwilinski, Oleksii Lyulyov, and Tetyana Pimonenko, 2023.	<i>Green Finance</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa green finance memainkan peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di seluruh negara EU, dengan menggunakan SDG index sebagai variabel penjelas, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, dampak green finance terhadap pembangunan berkelanjutan bervariasi berdasarkan wilayah di dalam EU. Penulis pun menyarankan untuk mengadopsi strategi yang sesuai dengan kekuatan yang ada di setiap wilayah, sambil mengurangi hambatan yang mungkin menghambat adopsi inisiatif green finance, kerjasama lintas batas antar wilayah EU direkomendasikan untuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman terkait green finance.	Penelitian ini menemukan bahwa instrumen ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim perlu untuk diperhatikan, utamanya dalam 4 hal yakni <i>Enclosure, exclusion, encroachment, and entrenchment</i> . Hal tersebut penting dalam mempertimbangkan keberlanjutan pengembangan ekonomi dalam konteks perubahan iklim (green economy). Namun tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana tatanan global mempengaruhi negara.
19.	Distribution of Authority for Mining Business Permits between the Central Government and Regional Governments After the Enactment of the Minerba	Pandu Adi Cakranegara, Dedi Rianto Rahadi, and Etty Susilowati, 2023.	Hukum	Studi ini menemukan bahwa UU Minerba tahun 2009 mengalihkan kewenangan pemberian izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sehingga menimbulkan konflik di dalam pemerintah daerah. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan penggunaan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan	Hasil temuan pada penelitian ini yakni bahwa kerjasama dalam manajemen lingkungan di kota industri dapat ditingkatkan melalui implementasi CSR di sektor lingkungan. Perusahaan memiliki peran penting dalam menetapkan tujuan dan sasaran

	Law Number 4 of 2009			bahwa sentralisasi pemberian izin pertambangan dapat menyebabkan korupsi negara dan oligarki pengusaha pertambangan. Namun, pemerintah juga mengusulkan dua pendekatan untuk memitigasi masalah ini: melalui pendekatan sektor hilir pertambangan dan pendekatan fiskal, yang secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan kerja dan mensubsidi pendidikan dan usaha kecil.	kerjasama, sementara pemerintah memberikan dukungan dan koordinasi, dan forum CSR berperan sebagai fasilitator dan penghubung. Ketiga elemen ini saling melengkapi dan saling memperkuat untuk mencapai efektivitas kerjasama. (Muhlisin & Budiarto, 2023)
20.	The social and ecological costs of reforestation. Territorialization and industrialization of land use accompany forest transitions in Southeast Asia	Melanie Pichler, Manan Bhan, Simone Gingrich, 2021	ecology	Studi ini menyoroti dampak sosial dan ekologis yang negatif dari transisi hutan, yang membahayakan manfaat pemulihan hutan untuk mitigasi perubahan iklim. Peneliti menyoroti dimensi politik dan biofisik transisi hutan di Asia Tenggara, menganalisis pemisahan lahan pertanian dan hutan serta transisi ke mode produksi industri. Kombinasi konsep teritorialisasi negara dan transisi sosio-ekologis memungkinkan adanya pemahaman empiris mengenai dampak sosial dan ekologis yang negatif dari transisi hutan.	Penelitian ini tidak banyak berbicara secara holistik mengenai konsep green finance maupun investasi hijau. Namun penelitian ini memberikan pandangan mengenai salah satu upaya memitigasi perubahan iklim yakni reforestasi, yang mana hal tersebut termasuk kedalam upaya negara dalam merespon agenda lingkungan
21.	NGO Influence in the Implementation of the Kyoto Protocol: Compliance, Flexibility	Lars H. Gulbrandsen and Steinar Andresen, 2017	Internasional Regime	LSM telah mencapai beberapa keberhasilan dalam membentuk rezim kepatuhan, terutama pada tahap awal sebelum rezim tersebut menjadi lebih dipolitisasi. Namun, interaksi yang erat antara beberapa LSM dan delegasi membuat sulit untuk melacak pola	Terdapat keserasihan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pola <i>compliance</i> yang tercipta dari rezim internasional. Pada penelitian ini ditekankan bahwa

	Mechanisms, and Sinks			<p>pengaruh yang sebenarnya. LSM mempunyai pandangan yang berbeda mengenai mekanisme fleksibilitas dan penurunannya, dimana beberapa LSM penasehat di AS mempunyai pencapaian tujuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan LSM aktivis. Kompleksitas permasalahan iklim telah membuat peran aktivis tradisional di LSM menjadi menantang. Meningkatkan kepatuhan iklim di masa depan memerlukan penanganan “celah” yang terkait dengan penurunan dan mekanisme fleksibilitas dan bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran dan tradisi negara yang bersangkutan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kapasitas “orang dalam” yang lebih besar diperlukan agar LSM dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar</p>	<p>pola kepatuhan itu diupayakan oleh NGO. Namun pada penelitian ini tidak dibahas lebih lanjut pola global governance maupun permasalahan green finance.</p>
22.	eThekwini’s Green and Ecological Infrastructure Policy Landscape	Richard Meissner, 2021	ecology	<p>Buku ini berfokus pada topik infrastruktur hijau dan ekologi serta perannya dalam menjamin keamanan air di tingkat kota. Lebih lanjut mengeksplorasi konsep infrastruktur ramah lingkungan dan kemampuannya dalam memitigasi dampak negatif seperti banjir dan polusi. Buku ini membahas pentingnya pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan perlunya keterlibatan aktif mereka dalam</p>	<p>Buku ini hanya berfokus tentang bagaimana penanganan perubahan iklim melalui pembangunan infrastruktur air pada level kota. Buku ini memberikan pandangan akan pentingnya mengatasi perubahan iklim antropogenik jangka panjang dalam kaitannya dengan ketahanan</p>

				pemerintahan dan pembangunan.	air dan infrastruktur ramah lingkungan.
23.	The Political Dynamics Of Green Transformations: Feedback effects and institutional context	Matthew Lockwood, 2015	<i>Green Transformations</i>	<p>Dinamika politik transformasi hijau dipengaruhi oleh efek umpan balik dan konteks kelembagaan. Hubungan antara penyedia energi, pembuat kebijakan, dan pengguna energi menentukan investasi, perubahan teknologi, dan hasil seperti emisi gas rumah kaca.</p> <p>Konteks diskursif, kelembagaan, dan politik yang lebih luas di mana kebijakan dibuat dan diterapkan juga mempengaruhi dinamika transformasi hijau.</p> <p>Implikasi politik dari pembuatan kebijakan iklim harus dipertimbangkan, dan strategi untuk mendapatkan umpan balik positif harus dikembangkan</p>	<p>Penelitian ini memberikan pandangan akan pengaruh politik pada upaya mencegah perubahan iklim. Namun tidak secara spesifik berbicara mengenai pengaruh hilirisasi minerba di Indonesia.</p>
24.	Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan Dan Ketahanan Nasional	Adi Subiyanto, Rizalditra Boer, Edwin Aldrian, Perdinan, Rilus Kinseng, 2018.	Keamanan	<p>Perubahan iklim dianggap sebagai ancaman yang memperburuk tren, ketegangan, dan ketidakstabilan yang ada. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam, perpindahan penduduk, dan tekanan tambahan pada sistem sosial-ekonomi dan lingkungan. Perubahan iklim dikategorikan sebagai gangguan dan/atau potensi ancaman terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Dampak Perubahan Iklim meliputi penurunan produksi pertanian/perikanan, gangguan transportasi, meningkatnya kekeringan,</p>	<p>Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan iklim dapat menjadi ancaman serius bagi ketahanan dan keamanan nasional. Namun penelitian ini tidak secara spesifik membahas terkait <i>green finance</i> maupun hilirisasi minerba.</p>

				kebakaran hutan, kejadian cuaca ekstrem, dan banjir pesisir. Strategi mitigasi dan adaptasi sangat penting dalam mengatasi risiko dan dampak Perubahan Iklim. Mitigasi berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, sedangkan adaptasi melibatkan penyesuaian fisik, sosial-ekonomi, dan sumber daya manusia.	
25.	Higher cost of finance exacerbates a climate investment trap in developing economies	Nadia Ameli, Olivier Dessens, Matthew Winning, Jennifer Cronin, Hugues Chenet, Paul Drummond, Alvaro Calzadilla, Gabriel Anandarah & Michael Grubb, 2021	Ekonomi Politik Internasional	Studi ini menunjukkan bahwa biaya pendanaan mempunyai dampak yang signifikan terhadap jalur dekarbonisasi di negara-negara berkembang, dengan asumsi biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) yang berbeda-beda sehingga menimbulkan dampak yang tidak proporsional. Penerapan nilai-nilai WACC yang spesifik secara regional menghasilkan 35% lebih rendahnya produksi listrik ramah lingkungan di Afrika untuk jalur 2°C yang hemat biaya dibandingkan dengan mengabaikan pertimbangan regional. Menurunkan nilai WACC untuk teknologi rendah karbon dan tinggi karbon pada tahun 2050 akan memungkinkan Afrika mencapai emisi nol bersih sekitar 10 tahun lebih awal. Kerangka pendanaan yang ada saat ini menghadirkan hambatan terhadap aliran pendanaan untuk investasi terkait iklim, sehingga menciptakan jebakan investasi iklim di negara-negara berkembang.	Penelitian ini secara spesifik berbicara mengenai pentingnya biaya pendanaan dalam rangka mengurangi emisi karbon. Penelitian ini pula berbicara mengenai investasi hijau dan Hambatannya. Namun dalam penelitian ini tidak secara spesifik berbicara mengenai hilirisasi minerba di Indonesia.

26.	Enhanced Financial Mechanisms For Post-2012 Mitigation	Christian Figueres dan Charlotte Streck, 2009.	Ekonomi Politik Internasional	Mekanisme keuangan untuk mitigasi pasca tahun 2012 diperkirakan akan dilakukan secara bertahap dan bertahap karena kendala politik yang ada saat ini dan kurangnya kepercayaan antara negara maju dan negara berkembang. Krisis keuangan global berpotensi mengubah jalan ke depan dengan meningkatkan urgensi mengatasi perubahan iklim. Modal sektor publik telah diinvestasikan dalam langkah-langkah kuratif krisis keuangan, namun masih kurangnya keyakinan akan urgensi investasi dalam sistem energi. Stabilisasi iklim dapat dicapai dengan perkiraan investasi sebesar USD 200 miliar per tahun, yang berkontribusi terhadap tantangan iklim dan ketahanan energi jangka panjang.	Dari penelitian ini mempertegas adanya persaingan global dalam konteks keuangan pendanaan iklim. Namun penelitian ini tidak secara spesifik berbicara mengenai hilirisasi minerba.
27.	Climate change and the macro-economy: a critical review	Sandra Batten, 2018	Ekonomi Politik Internasional	Penelitian ini mengulas isu-isu pemodelan teoritis dan empiris utama dalam menganalisis risiko makroekonomi perubahan iklim. Pendekatan ini membedakan antara risiko fisik dan risiko transisi dan mengidentifikasi saluran-saluran yang melaluinya risiko-risiko tersebut disalurkan ke perekonomian makro. Berbagai pendekatan yang berbeda dalam memodelkan dampak-dampak ini dibahas dan dinilai mengingat kebutuhan untuk memantau dan mengukur dampak perubahan iklim	Penelitian secara rigid menjelaskan kerangka ekonomi dalam konteks perubahan iklim. Namun tidak secara spesifik pada bagaimana lingkungan global mempengaruhi perilaku negara dalam mengelola finansial hijau.

				terhadap perekonomian. Model Penilaian Terpadu (IAM) memiliki keterbatasan dalam representasi iklim dan sistem ekonomi, khususnya dalam pendekatan statisnya dalam memodelkan kerusakan iklim. Kerangka pertumbuhan diusulkan untuk mengatasi kekurangan ini.	
28.	The Growth Of Economic Nationalism And Its International Consequences	(Schreckler, 1934)	<i>Economic Nationalism</i>	Makalah ini membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mencapai bentuk kehidupan terbaik manusia pada generasi saat ini, menekankan perlunya memahami situasi saat ini dan beradaptasi dengan kebutuhannya. Membahas kemandirian ekonomi, barang berkualitas tinggi untuk ekspor. Berfokus pada swasembada hasil pertanian dan ekspor berkualitas tinggi. Penelitian ini juga menyoroti diskusi mengenai aspek ekonomi, teknis, dan politik dari situasi saat ini.	Tulisan ini menyediakan kerangka konseptual terkait <i>economic nationalism</i> . Dalam tulisan tidak menyinggung perihal apapun seputar perubahan iklim maupun mekanisme <i>green finance</i> dan <i>green investment</i> di Indonesia.
29.	Economic nationalism : from Friedrich List to Robert Reich	(Levi-Faur, 1997)	<i>Economic Nationalism</i>	Membahas pentingnya nasionalisme ekonomi dan pemikiran ekonomi nasional. Menyoroti sumber kekayaan dan kekuasaan nasional dalam nasionalisme ekonomi. Tulisan ini menekankan pentingnya memahami nasionalisme ekonomi dalam konteks perubahan dinamika ekonomi global, di mana isu daya saing, globalisasi, dan solidaritas nasional memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan hasil ekonomi.	Tulisan ini menyoroti perihal perkembangan konsep <i>economic nationalism</i> . Terdapat beberapa konsep yang dijabarkan, mulai dari Robert Reich hingga Benjamin Cohen. Namun penelitian ini tidak membahas perihal tantangan perubahan iklim dalam konteks ekonomi secara gamblang.

30.	Economic Nationalism	(Gregory, 1931)	<i>Economic nationalism</i>	Tulisan ini menekankan pentingnya melawan nasionalisme ekonomi dengan mendorong kerja sama internasional dan penciptaan kekayaan. Hal ini berkaitan dengan perlunya menyelaraskan kesejahteraan individu dengan kepentingan negara dalam masyarakat demokratis. Tulisan ini memperkirakan peningkatan sentimen nasionalis karena masalah ekonomi yang belum terselesaikan, khususnya di negara-negara agraris. Hal ini memerlukan pendekatan rasional terhadap nasionalisme ekonomi, dan memperingatkan agar tidak memaksakan keyakinan pada negara lain sambil mempertimbangkan keadaan unik masing-masing negara.	Tulisan ini menyediakan kerangka pemikiran yang lebih utuh terkait <i>economic nationalism</i> serta keterlibatan sistem internasional dalam interaksi antar aktor utamanya negara. Namun penelitian ini tidak secara spesifik berbicara dalam kerangka ekonomi perubahan iklim.
31.	The Mercantile System In The Time Of Thomas Mun	(Mun & Hinton, 1955)	<i>Mercantilism (economic nationalism)</i>	Ide-ide merkantilis yang dibahas dalam makalah ini sebagian besar dipengaruhi oleh depresi ekonomi, dengan fokus pada ketertiban, kepatuhan masyarakat, dan pentingnya navigasi. Thomas Mun dan orang-orang sezamannya menginginkan perdagangan yang 'seimbang' untuk meningkatkan emas dan perak melalui perdagangan luar negeri, tidak semata-mata untuk neraca pembayaran yang menguntungkan tetapi juga sebagai sarana menuju kemakmuran. Kaum merkantilis menginginkan lebih banyak uang untuk menstimulasi bisnis dan	Tulisan ini berfokus pada penjelasan mengenai bagaimana negara menguatkan pertumbuhannya dengan meningkatkan aktivitas perdagangan. Konsep ini sejalan dengan <i>economic nationalism</i> yang pada penelitian ini dipakai guna memvalidasi pemerintah Indonesia dalam melakukan hilirisasi mineral. Namun penelitian ini tidak menjelaskan sama sekali terkait kerangka <i>green</i>

				perdagangan, bukan untuk menaikkan harga, karena mereka percaya bahwa uang yang diinvestasikan dalam bisnis dan diedarkan akan mendorong aktivitas ekonomi terlepas dari pengaruhnya terhadap harga.	<i>finance</i> dan konsep ekonomi lainnya yang berkaitan dengan ide berkelanjutan.
32.	Is Economic Nationalism Good for the Environment? A Case Study of Singapore	(Anwar & Sam, 2012)	<i>Economic nationalism</i>	Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan lingkungan hidup Singapura terutama didorong oleh kepentingan ekonomi, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan kepedulian lingkungan global. Laporan ini menyoroti bahwa nasionalisme ekonomi dapat selaras dengan tujuan-tujuan lingkungan hidup global, yang menunjukkan bagaimana negara-negara memprioritaskan pertumbuhan ekonomi mereka sambil secara selektif terlibat dalam inisiatif-inisiatif global untuk memitigasi degradasi lingkungan. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan hidup Singapura diarahkan untuk memaksimalkan kepentingan lokal, yang menggambarkan tantangan dalam menyelaraskan rencana industrialisasi dengan mengatasi masalah pemanasan global.	Penelitian secara eksplisit menegaskan bahwa kerangka kerja ekonomi lingkungan bekerja dengan baik di Singapura. Bahkan agenda transformasi ini diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional lainnya, yang mana tidak keluar dari ide <i>economic nationalism</i> . Namun penelitian tidak secara jelas menjelaskan rezim internasional terkait perubahan iklim memainkan peran dalam perumusan kebijakan di Singapura. Terlebih penelitian ini tidak berfokus pada hambatan agenda hilirisasi mineral di Indonesia
33.	The Ultimate Challenge: Nationalism and Climate Change	(Conversi, 2020)	<i>Economic nationalism</i>	Makalah ini memperkenalkan konsep nasionalisme sumber daya dan nasionalisme hijau sebagai cara negara memobilisasi narasi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Laporan	Pemaparan terkait <i>resource nationalism</i> memberikan pandangan yang sejalan dengan <i>economic nationalism</i> pada

				<p>ini menyoroti kemampuan adaptasi nasionalisme dalam menghadapi transisi energi global dan perlunya mengkaji ulang narasi nasionalis untuk mengatasi perubahan iklim secara efektif. Penelitian ini menekankan keterputusan antara retorika nasionalis, khususnya dalam nasionalisme sumber daya, dan realitas lingkungan hidup di lapangan, dimana wilayah yang terkena dampak ekstraksi sumber daya sering kali paling menderita namun tidak mendapatkan manfaatnya. Laporan ini mempertanyakan apakah nasionalisme dapat menjadi fasilitator atau hambatan terhadap kebijakan perubahan iklim yang kuat, dan mendesak dibentuknya bentuk nasionalisme yang lebih sadar iklim dan proaktif dalam mendorong strategi mitigasi iklim. Makalah ini menggarisbawahi pentingnya memasukkan diskusi perubahan iklim ke dalam wacana nasionalis dan perlunya negara-negara mengatasi tantangan lingkungan secara kolektif untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan.</p>	<p>konteks pengentasan perubahan iklim. Agenda perubahan iklim sering berbenturan dengan agenda transformasi hijau. Konsep tersebut dapat menjawab program hilirisasi minerba di Indonesia, namun penelitian ini tidak secara spesifik membahas studi kasus tersebut. Penelitian ini juga tidak menjelaskan bagaimana <i>global governance theory</i> berperan dalam proses transformasi hijau.</p>
34.	Politics and theory of global governance	(Fioretos & Tallberg, 2021)	<i>Global Governance Theory</i>	<p>Buku ini menyajikan teori otoritas refleksif Zürn sebagai pendekatan baru untuk memahami tata kelola global, yang menekankan dinamika internal sistem dan peran rasa hormat dalam melegitimasi institusi tata kelola global. Teori ini</p>	<p>Secara garis besar teori <i>global governance</i> yang dijabarkan dalam buku ini menjelaskan bagaimana institusi internasional, organisasi internasional dan</p>

				<p>dibekali 3 indikator yakni legitimasi, otoritas dan kontestasi, semuanya dalam konteks tata kelola global.</p>	<p>rezim internasional berperan dalam dinamika politik internasional. Dalam memandang perubahan iklim, tentu teori ini membantu dalam menerjemahkan aktifitas di level internasional bagi negara, namun penelitian ini tidak secara spesifik membahas isu perubahan iklim.</p>
35.	A Theory of Global Governance : Authority, Legitimacy, and Contestation	(Zürn, 2018)	<i>Global Governance Theory</i>	<p>Analisis dalam makalah penelitian menemukan bahwa mekanisme kausal penguatan melalui politisasi efektif dalam sembilan dari sepuluh kasus yang diteliti, yang menunjukkan tingginya tingkat otoritas yang mengarah pada politisasi. Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Uni Eropa (UE) menerapkan ketentuan untuk melindungi hak proses hukum dalam kebijakan sanksi mereka guna meningkatkan legitimasi. Selain itu, PBB memperkenalkan ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak subsisten dalam kebijakan sanksinya sebagai respons terhadap tekanan eksternal dan upaya delegitimasi. Demikian pula PBB, NATO, Bank Dunia, dan IMF memasukkan ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam operasi mereka untuk melawan upaya delegitimasi. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika dihadapkan</p>	<p>Penelitian ini memberikan studi kasus yang lebih lengkap mengenai penerapan 3 indikator teori tata kelola global. Namun tetap tidak menyajikan isu perubahan iklim dan kerangka ekonomi terkait</p>

				<p>pada tantangan terhadap legitimasi dan tekanan eksternal, lembaga-lembaga internasional beradaptasi dengan menerapkan langkah-langkah dan ketentuan perlindungan untuk mengatasi kritik dan mempertahankan otoritas dan kredibilitas mereka.</p>	
36.	International Organizations The Politics and Processes of Global Governance	(Karns et al., 2015)	<i>Global Governance Theory</i>	<p>Makalah penelitian ini menyoroti keberhasilan dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menangani isu-isu internasional, khususnya sengketa wilayah Eropa dan pembentukan sistem mandat. Keberhasilan Liga ini termasuk melakukan pemungutan suara di wilayah seperti Silesia dan Saar, menyelesaikan sengketa wilayah antara negara-negara seperti Finlandia dan Rusia, dan mengawasi sistem mandat bagi bekas jajahan Jerman di bawah pengawasan berbagai kekuatan. Namun, Liga tersebut gagal karena ketergantungannya pada kerja sama sukarela, yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk secara efektif menanggapi tantangan seperti invasi Jepang ke Manchuria dan invasi Italia ke Ethiopia, yang melemahkan legitimasinya. Kegagalan Liga untuk bertindak tegas dalam berbagai krisis, ditambah dengan kurangnya dukungan dari negara-negara besar seperti Inggris dan Perancis, pada akhirnya menyebabkan penurunan kekuasaan dan</p>	<p>Penelitian ini memberikan studi kasus yang lebih lengkap mengenai penerapan 3 indikator teori tata kelola global. Namun tetap tidak menyajikan isu perubahan iklim dan kerangka ekonomi terkait</p>

				legitimasi Liga. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ini mempengaruhi restrukturisasi pemerintahan internasional, yang mengarah pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penggantinya.	
37.	The Theory and Practice of Global Governance : The Worst of All Possible Worlds?	(Hurrell, 2011)	<i>Global Governance Theory</i>	Studi ini menekankan pentingnya memahami pengaruh lokus dalam tata kelola global, dan menyoroti bahwa hal ini seringkali tidak disadari dan berdampak pada proses pengambilan keputusan tanpa disadari oleh individu. Makalah ini membahas bagaimana tanggapan terhadap tantangan ekonomi dan politik pada suatu periode dapat menimbulkan konsekuensi yang berkelanjutan dan tidak terduga pada periode lain, sehingga berdampak pada struktur dan sejarah. Laporan ini menunjukkan bahwa tahun 1970-an merupakan tahun yang penting dalam membentuk lanskap ekonomi global dan dinamika kekuasaan saat ini, terutama dalam kaitannya dengan negara-negara berkembang dan otoritas AS.	Penelitian ini menawarkan studi kasus yang komprehensif mengenai pemanfaatan tiga indikator yang berasal dari teori tata kelola global. Namun, ia gagal membahas topik perubahan iklim di samping kerangka ekonomi terkait.
38.	Global Social Movements in Global Governance	(Bennett, 2012)	<i>Global Governance Theory</i>	Gerakan sosial global (GSM) memainkan peran penting dalam tata kelola global dengan menetapkan agenda, memberikan informasi, dan mendukung solusi yang berbeda dari aktor lainnya. Potensi kepemimpinan demokratis GSM dibatasi oleh kurangnya keterwakilan mereka, yang bervariasi	Penelitian ini menawarkan studi kasus yang komprehensif mengenai pemanfaatan tiga indikator yang berasal dari teori tata kelola global. Namun, ia gagal membahas topik perubahan iklim di

				<p>antar gerakan. Pelabelan perdagangan yang adil, sebuah lembaga yang dominan dalam gerakan perdagangan yang adil, mempengaruhi pengambilan keputusan, namun menghadapi kelemahan internal seperti kurangnya keterwakilan dan akses sumber daya yang tidak setara. Makalah ini menyarankan bahwa menganalisis atribut representasi masing-masing GSM sangat penting untuk memahami dampaknya terhadap tata kelola global dan demokrasi</p>	<p>samping kerangka ekonomi terkait.</p>
39.	Global Governance and the Environment	(Biermann, 2014)	<i>Global Governance Theory</i>	<p>Makalah ini menggali implikasi narasi Anthropocene terhadap tata kelola skala global, dan menekankan perlunya respons manusia yang transformatif. Penulisnya, Frank Biermann, melakukan analisis rinci mengenai politik lingkungan global melalui lima dimensi tata kelola yang efektif. Biermann mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk tata kelola lingkungan hidup di masa depan dan penyegaran kembali sistem PBB</p>	<p>Menekankan peranan lembaga internasional dalam studi kasus perubahan iklim. Namun penelitian ini tidak secara spesifik membahas keterkaitan dengan <i>economic nationalism</i> dalam tantangan negara menegakkan ekonomi berkelanjutan.</p>
40.	Global Governance & Cosmopolitan Citizens	(Norris, 2000)	<i>Global Governance Theory</i>	<p>Preferensi masyarakat terhadap perdagangan bebas dibandingkan proteksionisme masih rendah, dengan hanya sekitar sepertiga masyarakat yang menyukai perdagangan bebas, terutama pada pertengahan tahun 1990an. Sikap terhadap globalisasi ditemukan selaras dengan dimensi yang diperkirakan,</p>	<p>Penelitian ini menawarkan studi kasus yang komprehensif mengenai pemanfaatan tiga indikator yang berasal dari teori tata kelola global. Namun, ia gagal membahas topik perubahan iklim di</p>

				<p>seperti identitas kosmopolitan, kepercayaan institusional, dan dukungan kebijakan. Misalnya, mereka yang mendukung perdagangan bebas juga cenderung mendukung pergerakan bebas pekerja migran melintasi batas negara. Faktor muatan menjelaskan dua pertiga dari perbedaan sikap, yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara dukungan terhadap perdagangan bebas, kepercayaan pada lembaga internasional, dan identitas kosmopolitan. Terkikisnya kedaulatan dan otonomi negara-bangsa akibat tata kelola global telah menimbulkan pertanyaan mengenai transformasi identitas nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga global, menyoroti kompleksitas tanggapan masyarakat terhadap globalisasi.</p>	samping kerangka ekonomi terkait.
41.	After Hegemony Cooperation And Discord In The World Political Economy	(R. O. Keohane, 1984)	<i>Foreign policy</i>	<p>Penelitian ini mengeksplorasi penciptaan, pemeliharaan, dan evolusi rezim internasional menggunakan teori pilihan rasional dan fungsi kelembagaan, menunjukkan bahwa pemerintah dapat membentuk rezim internasional berdasarkan kepentingan bersama bahkan dengan motivasi egois. Hal ini menekankan bahwa pemerintah dapat mematuhi peraturan rezim, yang mencerminkan egoisme rasional dan berusaha untuk mengubah rezim yang ada daripada meninggalkannya,</p>	<p>Penelitian memberikan penekanan pada fungsi rezim pada isu-isu tertentu terhadap perumusan kebijakan luar negeri negara. Bagaimana kemudian negara berinteraksi pada level internasional. Kemudian terdapat pola timbal balik yang terjadi atas konsekuensi kepatuhan pada rezim internasional. Namun penelitian ini tidak memberikan</p>

				sehingga mengarah pada evolusi rezim daripada kehancurannya. Analisis ini menyoroti fungsi berharga dari rezim internasional dalam mengurangi biaya transaksi, meningkatkan biaya tindakan tidak sah, mengurangi ketidakpastian, dan memfasilitasi negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antar pemerintah. Makalah ini menggarisbawahi bahwa rezim internasional tidak menggantikan perundingan namun memberi wewenang pada jenis perundingan tertentu, sehingga mempengaruhi insentif kepatuhan dengan menghubungkan isu-isu dan saling berhubungan.	penjelasan lebih lanjut mengenai upaya penerapan ekonomi berkelanjutan.
42.	Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics	(Moravcsik, 1977)	<i>Foreign Policy</i>	Moravcsik berpendapat bahwa politik internasional harus dipahami melalui kacamata politik dalam negeri. Ia berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara terutama didorong oleh kepentingan dan preferensi dalam negeri, bukan oleh keseimbangan kekuatan atau faktor sistemik. Perspektif ini mengalihkan fokus dari negara sebagai aktor kesatuan menjadi entitas kompleks di mana dinamika internal memainkan peran penting dalam menentukan perilaku eksternal.	Penelitian ini menekankan proses perumusan kebijakan luar negeri yang tidak dipengaruhi oleh dinamika politik di dalam sistem internasional. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas perubahan iklim, namun memberikan pandangan dalam posisi Indonesia yang tetap memprioritaskan pembangunan dalam negerinya melalui hilirisasi mineral di tengah desakan agenda transformasi hijau.
43.	Economics of climate change	(Meyer, 1995)	Ekonomi Politik	Karya Aubrey Meyer di bidang ekonomi perubahan iklim, khususnya	Karya Meyer ini menjelaskan secara dasar bagaimana

			Internasi onal	<p>pengembangan dan promosi pendekatan "Kontraksi dan Konvergensi" (C&amp;C), telah memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana strategi mitigasi pemanasan global. Tinjauan literatur ini merangkum aspek-aspek utama dari penelitian Meyer, dengan fokus pada pendekatan C&amp;C dan implikasinya terhadap tata kelola perubahan iklim. Pendekatan C&amp;C mengusulkan metode untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dengan menetapkan batas atas jumlah total karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) di atmosfer dan kemudian mengalokasikan hak emisi ke negara-negara berdasarkan kontribusi historis dan jumlah populasi. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua negara mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan CO<sub>2</sub>, sehingga mengatasi kesenjangan tingkat emisi saat ini antara negara maju dan berkembang.</p>	<p>konsep perekonomiann dalam konteks oengentasan perubahan iklim bekerja di level internasional. Namun tidak secara spesifik berbicara hamabtan yang terjadi di Indonesia utamanya dalam konteks menarik investasi hijau</p>
44.	Internationa l Political Economy: Overview and Conceptuali zation	(Marlin- Bennett, 2010)	Ekonom i Politik Internasi onal	<p>Karya Marlin-Bennett memperkenalkan studi IPE, menekankan pentingnya memahami bagaimana negara, aktor domestik, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional berinteraksi dalam sistem ekonomi global. Kursus ini bertujuan untuk membekali siswa dengan alat yang diperlukan untuk menganalisis proses ekonomi global,</p>	<p>Renee memberikan kerangka berpikir IPE dalam konteks negara pada level internasional. Kerangka IPE yang dijelaskan dapat diimplementasikan dalam melihat agenda transformasi hijau pada skala global, walaupun penleitina ini tidak secara spesifik membahas studi</p>

				menggunakan kerangka teoritis untuk menilai dampak krisis keuangan, globalisasi, dan pembangunan terhadap politik dan ekonomi internasional	kasus pengentasan perubahan iklim di Indonesia
45.	A Revised Marxist Political Economy of National Education Markets	(Marginson, 2004)	Ekonomi Politik Internasional	Karya Marginson didasarkan pada teori Marxis klasik untuk menganalisis pasar pendidikan dalam konteks masyarakat kapitalis. Ia berpendapat bahwa pasar pendidikan, seperti pasar lainnya, dibentuk oleh dinamika akumulasi modal dan perjuangan kelas. Perspektif ini menantang analisis ekonomi tradisional mengenai pasar pendidikan, yang seringkali berfokus pada efisiensi dan persaingan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang lebih luas. Marginson secara kritis mengevaluasi kebijakan pendidikan neoliberal, yang menekankan persaingan pasar dan pilihan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ia berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut seringkali mengabaikan dimensi sosial dan politik pendidikan, sehingga menyebabkan meningkatnya kesenjangan dan marketisasi pendidikan. Marginson menganjurkan pendekatan yang lebih seimbang yang menggabungkan mekanisme pasar dengan pengawasan peraturan yang kuat untuk	Penelitian ini sedikit memberikan penjelasan mengenai kerangka ekonomi pada konteks perubahan iklim. Namun memberikan pandangan mengenai bagaimana perumusan kebijakan mengenai ekonomi sering kali hanya didasarkan pada persaingan dan kekayaan semata tanpa mempertimbangkan isu yang lebih besar dan mendasar.

				memastikan keadilan sosial dan kepentingan publik	
46.	Political economies of climate change	(Paterson & P-Laberge, 2018)	Ekonomi Politik Internasional	Paterson berpendapat bahwa perubahan iklim tidak dapat dipahami hanya melalui kaca mata lingkungan atau ilmiah; ini pada dasarnya adalah masalah ekonomi politik. Ia menekankan bahwa penyebab, konsekuensi, dan solusi potensial terhadap perubahan iklim sangat terkait dengan struktur ekonomi global, sistem politik, dan kesenjangan sosial. Perspektif ini menantang kerangka tradisional mengenai perubahan iklim sebagai masalah lingkungan hidup dan memerlukan pendekatan yang lebih luas dan terpadu untuk mengatasinya.	Penelitian memvalidasi akan kebutuhan mengentaskan permasalahan iklim pada konteks ekonomi politik. Namun penelitian ini tidak secara spesifik berbicara mengenai studi kasus di Indonesia.
47.	Reflections on the Economics of Climate Change	(Nordhaus, 1993)	Ekonomi Politik Internasional	Nordhaus mengintegrasikan analisis ekonomi dengan ilmu lingkungan untuk menilai implikasi ekonomi dari perubahan iklim. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan biaya mitigasi perubahan iklim dan manfaatnya, termasuk pencegahan potensi kerusakan ekosistem dan perekonomian. Nordhaus menganjurkan pendekatan analisis biaya-manfaat untuk mengevaluasi kebijakan perubahan iklim. Hal ini mencakup mempertimbangkan biaya pengurangan emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan manfaat menghindari dampak buruk perubahan iklim. Ia berpendapat bahwa analisis semacam itu sangat penting untuk membuat keputusan	Nordhaus memberikan pandangan yang melengkapi penegasan akan urgensi pengentasan perubahan iklim melalui kerangka ekonomi. Meskipun tidak secara spesifik membahas teori global governance dan studi kasus hilirisasi di Indonesia.

				yang tepat mengenai upaya mitigasi perubahan iklim	
48.	Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies	(Okano-Heijmans, 2011)	Ekonomi Politik Internasional	Okano-Heijmans mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai penggunaan instrumen dan strategi ekonomi oleh negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Ia menekankan bahwa diplomasi ekonomi bukan hanya tentang perdagangan tetapi mencakup berbagai kegiatan ekonomi, termasuk investasi, bantuan, dan jasa keuangan, yang bertujuan untuk mempengaruhi hubungan internasional dan mencapai kepentingan nasional. Penulis mengembangkan kerangka teori yang mengintegrasikan wawasan dari hubungan internasional, ekonomi, IPE, dan studi diplomatik untuk memahami sifat diplomasi ekonomi yang memiliki banyak segi. Kerangka kerja ini mengakui adanya interaksi yang kompleks antara faktor ekonomi dan politik dalam membentuk perilaku negara dan hubungan internasional.	Kesenjangan dalam literatur terletak pada kurangnya analisis komprehensif mengenai bagaimana kebijakan hilirisasi mineral dan batubara Indonesia berdampak pada kemampuannya menarik investasi ramah lingkungan dalam konteks tata kelola global dan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Secara khusus, terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini berinteraksi dengan standar lingkungan hidup internasional, ekspektasi investor terhadap proyek ramah lingkungan, dan kerangka tata kelola global yang lebih luas untuk keuangan ramah lingkungan.
49.	Handbook On International Political Economy	(Pettman, 2012)	Ekonomi Politik Internasional	Buku pegangan Pettman menggali kompleksitas IPE, mengkaji bagaimana kegiatan ekonomi dibentuk oleh struktur dan proses politik di tingkat nasional dan internasional. Salah satu tema sentral dalam karya Pettman adalah dampak globalisasi terhadap dinamika kekuasaan antar negara. Ia mengeksplorasi bagaimana meningkatnya integrasi	"Buku Pegangan Ekonomi Politik Internasional" karya Ralph Pettman memberikan landasan teoretis yang kaya untuk memahami kompleksitas hubungan ekonomi internasional. Penerapan wawasan Pettman pada kasus kebijakan hilirisasi

				<p>perekonomian telah menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuatan, sehingga mempengaruhi kemampuan negara untuk membentuk kebijakan dan hasil internasional. Pettman menekankan peran penting lembaga-lembaga internasional dalam memfasilitasi kerja sama antar negara dan mengelola urusan ekonomi global. Ia membahas evolusi lembaga-lembaga ini dan dampaknya terhadap pelaksanaan hubungan internasional. Buku pegangan ini juga membahas isu-isu lingkungan hidup, menyoroti semakin meningkatnya kesadaran akan perlunya praktik berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi internasional. Pettman mengeksplorasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh permasalahan lingkungan, termasuk peran keuangan ramah lingkungan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>mineral dan batubara di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan kritis dalam strategi negara untuk menarik investasi ramah lingkungan. Kesenjangan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih berbeda yang mempertimbangkan implikasi lebih luas dari kebijakan nasional terhadap kelestarian lingkungan global dan peran kerangka tata kelola internasional dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.</p>
50.	<i>Introduction to the Political Economy of Climate Change Adaptation</i>	(Sovacool & Linnér, 2016)	Ekonomi Politik Internasional	<p>Sovacool mengeksplorasi bagaimana ekonomi politik adaptasi perubahan iklim bersinggungan dengan berbagai sektor, termasuk energi, air, pertanian, dan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi adaptasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Penulisnya membahas peran penting kebijakan</p>	<p>Meskipun penelitian Benjamin Sovacool memberikan landasan berharga untuk memahami ekonomi politik adaptasi perubahan iklim, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai dampak spesifik kebijakan hilirisasi mineral dan batubara terhadap kemampuan</p>

				<p>pemerintah dan keterlibatan sektor swasta dalam adaptasi perubahan iklim. Ia menyoroti perlunya kerangka peraturan yang mendukung, insentif untuk inovasi, dan kemitraan publik-swasta untuk mendorong upaya adaptasi berkelanjutan.</p>	<p>Indonesia untuk menarik investasi ramah lingkungan dalam kerangka keuangan ramah lingkungan. Mengatasi kesenjangan ini dapat berkontribusi pada strategi dan kebijakan adaptasi perubahan iklim yang lebih efektif di Indonesia dan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.</p>
51.	<i>Towards a New Political Economy of Climate Change and Development</i>	(Tanner & Allouche, 2011)	Ekonomi Politik Internasional	<p>Tanner berpendapat bahwa perubahan iklim menghadirkan tantangan dan peluang bagi pembangunan ekonomi. Ia menekankan perlunya ekonomi politik baru yang mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini mengakui bahwa mengatasi perubahan iklim bukan hanya tentang mengurangi emisi tetapi juga tentang menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tahan terhadap dampak iklim. Tanner menganjurkan industrialisasi hijau sebagai jalan menuju pembangunan berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa transisi ke industri ramah lingkungan dapat menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Transisi ini memerlukan kebijakan dan investasi yang mendukung dalam energi terbarukan,</p>	<p>Meskipun karya Thomas Tanner memberikan wawasan berharga mengenai ekonomi politik perubahan iklim dan pembangunan, kesenjangan yang teridentifikasi terkait kebijakan hilirisasi mineral dan batubara di Indonesia menyoroti bidang penting untuk penelitian lebih lanjut dan pertimbangan kebijakan. Untuk mengatasi kesenjangan ini memerlukan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana kebijakan nasional dapat memfasilitasi atau menghambat transisi menuju ekonomi hijau, serta peran kerja sama internasional dalam membentuk jalur</p>

				efisiensi energi, dan teknologi berkelanjutan.	pembangunan berkelanjutan.
52.	The New Economic Diplomacy Decision-making and negotiation in international economic relations	(Bayne & Woolcock, 2017)	Ekonomi Politik Internasional	Woolcock berpendapat bahwa diplomasi ekonomi telah menjadi alat penting bagi negara-negara di dunia yang terglobalisasi. Ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk negosiasi perdagangan, promosi investasi, dan penggunaan instrumen keuangan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional. Woolcock menekankan pentingnya diplomasi ekonomi dalam membentuk tatanan ekonomi global dan memfasilitasi kerja sama antar negara. Buku ini menyoroti peran negara-negara berkembang, seperti Tiongkok dan India, dalam membentuk kembali aturan ekonomi global. Woolcock membahas bagaimana negara-negara ini menggunakan diplomasi ekonomi untuk menegaskan kepentingan mereka dan mempengaruhi agenda ekonomi global. Hal ini mencakup upaya untuk mempromosikan model ekonomi mereka sendiri dan menantang dominasi lembaga-lembaga yang dipimpin oleh Barat	“The New Economic Diplomacy” karya Stephen Woolcock memberikan wawasan berharga tentang sifat diplomasi ekonomi yang terus berkembang di era global. Namun hal ini menyisakan kesenjangan dalam memahami bagaimana kebijakan nasional tertentu, seperti kebijakan hilirisasi mineral dan batubara di Indonesia, dapat berdampak pada kemampuan suatu negara untuk menarik investasi ramah lingkungan dalam kerangka keuangan ramah lingkungan. Untuk mengatasi kesenjangan ini diperlukan analisis yang mendalam mengenai keterkaitan antara kebijakan ekonomi nasional dan tujuan keberlanjutan global, yang menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik terhadap diplomasi ekonomi yang mendukung pembangunan nasional dan kelestarian lingkungan global.

53.	A Classification of Different Approaches to Green Finance and Green Monetary Policy	(Dziwok & Jäger, 2021)	<i>Green Finance</i>	Dziwok mengategorikan keuangan hijau ke dalam beberapa pendekatan, antara lain obligasi hijau, pinjaman hijau, ekuitas hijau, dan asuransi hijau. Masing-masing instrumen ini dirancang untuk menyalurkan modal ke proyek dan kegiatan yang mempunyai dampak positif terhadap lingkungan. Klasifikasi ini juga mencakup pendekatan berbasis kebijakan, seperti subsidi dan insentif pajak, yang bertujuan untuk mendorong investasi ramah lingkungan. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh keuangan ramah lingkungan, seperti kurangnya standarisasi dan kesulitan dalam mengukur dampak investasi terhadap lingkungan. Namun, hal ini juga mengidentifikasi peluang pertumbuhan, khususnya di negara-negara berkembang dimana terdapat permintaan yang signifikan terhadap infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan	Karya Ewa Dziwok mengenai keuangan hijau dan kebijakan moneter memberikan wawasan berharga mengenai berbagai strategi yang diterapkan di seluruh dunia untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. Namun, kasus kebijakan hilirisasi mineral dan batubara di Indonesia menyoroti kesenjangan kritis dalam wacana global mengenai keuangan ramah lingkungan. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan implikasi lebih luas dari kebijakan sektoral terhadap transisi keseluruhan menuju perekonomian yang berkelanjutan dan berketahanan.
54.	<i>The Relevance of Cultural Diversity in Ethical and Green Finance</i>	(Borbély, 2017)	<i>Green Finance</i>	Borbély berpendapat bahwa keragaman budaya memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu dan institusi menuju keuangan yang beretika dan ramah lingkungan. Ia berpendapat bahwa budaya dengan penekanan kuat pada komunitas, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan lebih	Karya Emese Borbély tentang relevansi keragaman budaya dalam keuangan etis dan ramah lingkungan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana faktor budaya dapat mempengaruhi penerapan dan

				<p>cenderung mendukung dan terlibat dalam praktik keuangan ramah lingkungan. Sebaliknya, budaya dengan orientasi yang lebih individualistis mungkin kurang cenderung melakukan praktik-praktik ini kecuali ada insentif ekonomi atau dorongan peraturan yang jelas. Penulis mengeksplorasi bagaimana adaptasi budaya dapat memfasilitasi integrasi keuangan ramah lingkungan ke dalam sistem keuangan arus utama. Dia membahas pentingnya pendidikan, kampanye kesadaran, dan insentif kebijakan dalam mendorong perubahan budaya menuju keberlanjutan. Borbély juga menyoroti peran keragaman budaya dalam mendorong inovasi dan kreativitas dalam solusi keuangan ramah lingkungan</p>	<p>efektivitas praktik keuangan berkelanjutan. Namun, kasus kebijakan hilirisasi mineral dan batubara di Indonesia menyoroti kesenjangan kritis dalam memahami bagaimana kebijakan nasional dapat secara tidak sengaja menghambat daya tarik investasi ramah lingkungan dalam kerangka keuangan ramah lingkungan yang lebih luas.</p>
55.	The impact of green finance on carbon emission efficiency	(Wu et al., 2024)	<i>Green finance</i>	<p>Penelitian Wu berfokus pada bagaimana pembiayaan ramah lingkungan dapat meningkatkan efisiensi emisi karbon. Pembiayaan ramah lingkungan mengacu pada layanan dan produk keuangan yang dirancang untuk mendukung proyek dan kegiatan yang ramah lingkungan. Wu berpendapat bahwa dengan mengarahkan modal ke arah teknologi dan praktik rendah karbon, keuangan ramah lingkungan dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Temuan Wu</p>	<p>Penelitian Gongliang Wu mengenai dampak keuangan ramah lingkungan terhadap efisiensi emisi karbon memberikan dasar yang kuat untuk memahami peran mekanisme keuangan dalam kelestarian lingkungan. Namun, tema kebijakan hilirisasi mineral dan batubara yang mencari kesenjangan di Indonesia menyoroti</p>

				menunjukkan bahwa keuangan ramah lingkungan tidak hanya berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan namun juga mendukung pertumbuhan ekonomi dengan berinvestasi pada teknologi inovatif dan rendah karbon. Manfaat ganda ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan keuangan ramah lingkungan ke dalam strategi ekonomi nasional dan internasional.	tantangan penting dalam menarik investasi ramah lingkungan dalam kerangka keuangan ramah lingkungan.
56.	Green finance, social inclusion, and sustainable economic growth in OECD member countries	(Han & Gao, 2024)	<i>Green finance</i>	a mengeksplorasi bagaimana keuangan ramah lingkungan, yang mencakup investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur berkelanjutan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Studi ini menemukan bahwa keuangan ramah lingkungan tidak hanya berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, merangsang inovasi, dan menarik investasi asing langsung. Penelitian ini juga menyoroti peran keuangan ramah lingkungan dalam mendorong inklusi sosial. Dengan berinvestasi pada sektor-sektor yang memberikan manfaat bagi masyarakat marginal, seperti energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan, keuangan ramah lingkungan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan	Karya Jian Han menggarisbawahi peran penting keuangan ramah lingkungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusi sosial, khususnya dalam konteks negara-negara anggota OECD. Namun, penerapan wawasan ini di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan, yang ditandai dengan kebijakan hilirisasi mineral dan batubara.

				meningkatkan kohesi sosial.	
57.	Policy insight from renewable energy, foreign direct investment (FDI), and urbanization towards climate goal: insight from Indonesia	(Udemba & Philip, 2022)	<i>Green investment</i>	Udemba menyoroti peran penting energi terbarukan dalam mencapai tujuan iklim dan pentingnya FDI dalam mendukung pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan. Ia berargumentasi bahwa Indonesia, dengan sumber daya energi terbarukan yang berlimpah dan lokasinya yang strategis, dapat menarik investasi asing langsung (FDI) dalam jumlah besar di sektor energi terbarukan jika negara tersebut mengadopsi kebijakan yang menguntungkan. Penulis membahas bagaimana tren urbanisasi di Indonesia menghadirkan tantangan dan peluang bagi aksi iklim. Urbanisasi yang pesat tidak hanya meningkatkan kebutuhan energi dan emisi karbon, namun juga menawarkan platform untuk menerapkan perencanaan kota berkelanjutan dan integrasi energi terbarukan.	Meskipun penelitian Udemba memberikan wawasan berharga mengenai peran energi terbarukan, penanaman modal asing, dan urbanisasi dalam mencapai tujuan iklim Indonesia, penelitian ini juga menyoroti kesenjangan yang signifikan terkait dengan Kebijakan Hilirisasi Mineral dan Batubara. Mengatasi kesenjangan ini sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan transisi efektif menuju ekonomi hijau dan menarik investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.
58.	Perkembangan Kebijakan Green Investment Dalam Peraturan Perundang-Undangan di	(Adhi Pramana et al., 2023)	<i>Green Investment</i>	Karya M. Adhi Pramana berfokus pada pengembangan kebijakan investasi ramah lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi ini kemungkinan besar akan mengeksplorasi bagaimana Indonesia mengintegrasikan kelestarian lingkungan ke dalam kebijakan ekonominya, khususnya melalui promosi investasi ramah lingkungan. Hal ini dapat mencakup analisis	Karya Pramana memberikan wawasan berharga mengenai pengembangan kebijakan investasi hijau di Indonesia, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengisi kesenjangan yang teridentifikasi. Hal ini mencakup analisis yang lebih komprehensif mengenai kerangka keuangan ramah

				undang-undang atau peraturan tertentu yang mendorong atau memfasilitasi investasi ramah lingkungan, seperti investasi yang ditujukan untuk energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, atau ekowisata. Pramana juga dapat membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk hambatan birokrasi, kurangnya sumber daya keuangan, atau hambatan dari sektor perekonomian tertentu.	lingkungan, eksplorasi lebih dalam mengenai dampak kebijakan mineral dan batubara terhadap investasi ramah lingkungan, perspektif tata kelola global, dan studi kasus komparatif.
59.	Green transformations from below?	(Smith & Ely, 2015)	<i>Green transformations</i>	Karya Adrian Smith mengeksplorasi konsep transformasi hijau dari gerakan akar rumput, menekankan peran komunitas lokal dan aktor non-negara dalam mendorong kelestarian lingkungan. Smith berpendapat bahwa pendekatan tradisional yang bersifat top-down terhadap tata kelola lingkungan seringkali tidak efektif dan bahwa strategi bottom-up, yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat lokal, dapat memberikan hasil yang lebih berkelanjutan. Perspektif ini menantang kebijaksanaan konvensional bahwa perubahan lingkungan memerlukan intervensi negara yang kuat dan menyoroti potensi gerakan akar rumput untuk menghasilkan perbaikan lingkungan yang signifikan.	Karya Adrian Smith memberikan wawasan mengenai peran gerakan akar rumput dalam mendorong transformasi ramah lingkungan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara perspektif teoretis yakni <i>economic nationalism</i> dan penerapan praktis dalam konteks kebijakan hilirisasi mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kerangka keuangan ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di

					sektor mineral dan batubara.
60.	Political dynamics of green transformations	(Lockwood, 2015)	<i>Green transformations</i>	penelitian ini menganalisis peran lembaga-lembaga negara, kelompok kepentingan, dan ideologi politik dalam mendukung atau menghambat transformasi hijau di berbagai sektor dan negara. Laporan ini menyoroti bagaimana kepentingan bahan bakar fosil yang sudah mengakar dapat menolak kebijakan dekarbonisasi, dan tantangan untuk mengatasi penolakan ini melalui mobilisasi politik dan perancangan kebijakan.	Tidak ada kerangka tata kelola global yang mampu mengatasi ketegangan antara ekstraksi sumber daya, kebijakan hilirisasi, dan tujuan kelestarian lingkungan secara komprehensif. Kesenjangan tata kelola ini memungkinkan negara-negara untuk memprioritaskan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan lingkungan hidup.
61.	The net-zero transition What it would cost, what it could bring	(McKinsey Global Institute, 2022)	<i>Green transformations</i>	Negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu mengeluarkan porsi yang lebih besar dari PDB mereka (sekitar 10%) untuk belanja modal untuk dekarbonisasi dibandingkan dengan negara-negara maju (sekitar 6% dari PDB).  Beban investasi relatif yang lebih tinggi ini dapat membebani keuangan publik dan mempersulit upaya menarik investasi ramah lingkungan, terutama di negara-negara yang bergantung pada bahan bakar fosil.	Negara-negara berkembang mungkin kesulitan mengakses pendanaan ramah lingkungan dan pendanaan iklim yang memadai untuk mendukung upaya transisi mereka, yang dapat melanggengkan ketergantungan pada industri ekstraktif dan menghambat arus masuk investasi ramah lingkungan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, penguatan norma-norma tata kelola global, institusi, dan mekanisme pendanaan yang memberikan insentif dan

					mendukung negara-negara berkembang dalam transisi ramah lingkungan sangatlah penting, sekaligus mengatasi tantangan ekonomi politik dalam negeri.
62.	What Is Green? Transformation imperatives and knowledge politics	(Leach, 2015)	<i>Green transformations</i>	Leach menyoroti bagaimana berbagai aktor membingkai dan mengkonstruksi makna "hijau" berdasarkan kepentingan, nilai, dan sistem pengetahuan mereka. Politik pengetahuan ini menentukan jalur transformasi hijau mana yang diprioritaskan atau dipinggirkan. Transformasi ramah lingkungan mengacu pada perubahan multi-dimensi dan luas yang diperlukan di seluruh aspek masyarakat untuk mengatasi krisis lingkungan dan mencapai keberlanjutan.	Kepentingan dalam negeri yang mengakar dan terikat pada industri ekstraktif di Indonesia mungkin akan menolak kebijakan yang bertujuan menarik investasi ramah lingkungan jika hal tersebut mengancam dominasi ekonomi mereka, sehingga menimbulkan ketegangan antara tujuan lingkungan dan pembangunan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Leach menekankan perlunya proses yang lebih inklusif dan demokratis yang menyuarakan beragam perspektif dalam membentuk jalur transformasi hijau, serta mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan global.
63.	Invoking 'science' in green transformations	(Millstone, 2015)	<i>Green transformations</i>	Millstone menyoroti kekhawatiran tentang bagaimana kekuasaan dapat dilaksanakan dengan mengendalikan penciptaan, penyebaran, dan penggambaran bukti ilmiah	Kepentingan domestik terhadap bahan bakar fosil di Indonesia mungkin secara selektif menggunakan atau mendiskreditkan

				<p>mengenai isu-isu lingkungan. Agar ilmu pengetahuan dapat berkontribusi secara otentik terhadap transformasi hijau, transparansi mengenai pengetahuan, ketidakpastian, dan penerapan keahlian sangat penting di semua tingkat pemerintahan. Para pembuat kebijakan dan industri sering kali menggunakan keahlian ilmiah untuk membenarkan pemilihan teknologi, tingkat emisi, atau standar polusi tertentu sebagai teknologi yang berkelanjutan atau ramah lingkungan.</p>	<p>bukti ilmiah untuk menolak kebijakan yang bertujuan menarik investasi ramah lingkungan jika hal tersebut mengancam dominasi ekonomi mereka. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Millstone menekankan perlunya transparansi dan demokratisasi yang lebih besar dalam proses produksi dan penyebaran pengetahuan ilmiah dalam kerangka tata kelola lingkungan global.</p>
64.	Emancipating Transformations: From controlling 'the transition' to culturing plural radical progress	(Stirling, 2015)	<i>Green transformations</i>	<p>Stirling menantang anggapan bahwa mengatasi krisis lingkungan memerlukan penghentian demokrasi dan pemusatan kekuasaan di tangan elit teknokratis untuk mengendalikan dan mengelola "transisi". Ia berargumen bahwa "otoritarianisme lingkungan" ini bertentangan dengan perjuangan demokrasi yang pada awalnya membentuk kepedulian terhadap keberlanjutan. Makalah ini menyoroti contoh-contoh sejarah di mana kemajuan progresif terbesar (misalnya mengakhiri perbudakan, kolonialisme) muncul bukan dari transisi yang teratur dari atas ke bawah, melainkan dari "harapan yang tidak dapat diatur". menginspirasi perjuangan politik". Hal ini</p>	<p>Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bahan bakar fosil di Indonesia mungkin akan menolak kebijakan yang bertujuan menarik investasi ramah lingkungan jika diterapkan secara otoriter dari atas ke bawah (top-down) sehingga mengancam kekuatan ekonomi mereka dan gagal menegosiasikan jalur pembangunan alternatif secara demokratis. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Stirling mendukung demokratisasi tata kelola lingkungan hidup global dengan</p>

				menyerukan “memupuk kemajuan radikal yang plural” dengan mendemokratisasi proses transformasi dan mengakui beragam pengetahuan dan jalur.	mengakui pengetahuan plural, memberdayakan beragam suara, dan memungkinkan negosiasi jalur transformasi hijau yang konteksnya spesifik – daripada memaksakan resep universal yang melanggengkan kesenjangan dan defisit demokrasi.
65.	Green transformations in capitalism	(Newell, 2015)	<i>Green transformations</i>	Newell menyoroti keragaman model kapitalis di berbagai kawasan dan negara, yang membentuk kemungkinan transformasi hijau dengan cara yang berbeda-beda. Keberagaman ini berarti tidak ada satu cara yang bisa diterapkan untuk semua hal, karena struktur ekonomi politik memfasilitasi atau membatasi upaya keberlanjutan dengan cara yang berbeda-beda. bab ini mengeksplorasi bagaimana kekuatan modal keuangan global berpotensi dimanfaatkan untuk mendorong dekarbonisasi dan arus investasi ramah lingkungan. Namun, berbagai kelompok modal keuangan (misalnya investor institusi, bank, dll.) memiliki kepentingan berbeda-beda yang mungkin selaras atau bertentangan dengan tujuan keberlanjutan.	Proses tata kelola lingkungan hidup global rentan terhadap pengaruh korporasi dari kepentingan industri ekstraktif yang kuat, yang dapat meminggirkan upaya negara-negara seperti Indonesia untuk menarik investasi ramah lingkungan dibandingkan prioritas bahan bakar fosil dalam negeri. Beragamnya kapitalisme di berbagai wilayah menciptakan persaingan yang tidak seimbang, di mana struktur ekonomi dan kepentingan beberapa model kapitalis (misalnya ekonomi pasar liberal) mungkin lebih menerima aliran keuangan ramah lingkungan dibandingkan model-model lain yang memiliki kepentingan

					ekstraktif yang sudah mengakar.
66.	Mobilizing for green transformations	(Leach & Scoones, 2015)	<i>Green transformations</i>	Para penulis menyoroti bagaimana berbagai kelompok membingkai transformasi hijau dengan cara yang berbeda-beda, berdasarkan nilai, identitas, dan kepentingan mereka. Pluralitas kerangka ini membentuk visi, jalur, dan politik seputar upaya keberlanjutan. Bab ini membahas berbagai strategi mobilisasi yang digunakan oleh kelompok masyarakat sipil, mulai dari kontestasi terbuka, negosiasi dengan aktor negara/perusahaan, hingga membangun sistem alternatif. Strategi-strategi ini bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, mengubah hubungan kekuasaan dan menciptakan konfigurasi sosio-teknis baru.	Agenda transformasi hijau global sering kali dibuat oleh negara dan korporasi yang berkuasa, sehingga meminggirkan inovasi akar rumput dan visi alternatif dari konteks seperti sektor ekstraktif di Indonesia. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Leach dan Scoones menekankan perlunya tata kelola lingkungan global yang lebih inklusif, demokratis, dan polisentris yang memberdayakan beragam suara masyarakat sipil dan menciptakan ruang untuk menegosiasikan jalur transformasi hijau sesuai konteks – daripada memaksakan resep universal yang tidak terhubung dengan realitas lokal.
67.	The green entrepreneurial state	(Mazzucato, 2015)	<i>Green transformations</i>	Mazzucato menyoroti bagaimana lembaga publik seperti DARPA, BERD, dan National Renewable Energy Lab di AS, serta bank investasi publik di Jerman dan Tiongkok, telah melakukan investasi strategis pada teknologi ramah lingkungan tahap awal seperti energi terbarukan, penyimpanan energi, dan teknologi ramah lingkungan. Investasi publik ini sangat penting dalam	Tidak ada kerangka tata kelola global atau kebijakan nasional yang efektif di Indonesia yang memungkinkan model investasi bersama pemerintah-swasta yang adil di mana lembaga-lembaga publik berbagi risiko dan manfaat dari inovasi ramah lingkungan dan

				menciptakan lanskap teknologi baru dan mengurangi risiko investasi swasta di sektor ramah lingkungan. Mazzucato mengadvokasi model-model baru kemitraan publik-swasta di mana lembaga-lembaga publik berbagi risiko dan manfaat dari investasi dalam inovasi ramah lingkungan, dibandingkan hanya memberikan pendanaan di muka sementara pihak swasta memperoleh sebagian besar keuntungannya.	pengembangan industri.
68.	Financing green transformations	(Spratt, 2015)	<i>Green transformations</i>	Spratt menyoroti besarnya kebutuhan pendanaan untuk melakukan transisi menuju perekonomian rendah karbon dan ramah lingkungan di berbagai sektor seperti energi, transportasi, pertanian, dan infrastruktur perkotaan. Dia memperkirakan kebutuhan investasi global sebesar \$1-7 triliun per tahun untuk memenuhi tujuan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Bab ini membahas hambatan dalam memobilisasi aliran pendanaan ramah lingkungan yang memadai, termasuk jangka pendek di pasar keuangan, kurangnya insentif kebijakan, dan kesulitan dalam menentukan harga eksternalitas lingkungan. Laporan ini juga mencatat kepentingan industri bahan bakar fosil dan ekstraktif yang ada saat ini dalam menolak kebijakan transformatif yang dapat berdampak pada model bisnis mereka.	tidak adanya kerangka tata kelola global yang kuat untuk mengarahkan berbagai sumber pendanaan menuju prioritas investasi ramah lingkungan yang selaras dengan transformasi hijau di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya seperti Indonesia. Negara-negara berkembang mungkin kesulitan mendapatkan akses terhadap pendanaan ramah lingkungan yang memadai untuk mendukung kebijakan industri yang bertujuan untuk beralih dari sektor ekstraktif seperti batu bara dan mineral menuju kegiatan hilirisasi yang lebih berkelanjutan.

69.	The Living Environmental Education	(Fang et al., 2023)	<i>ecology</i>	<p>Buku ini menekankan pentingnya literasi lingkungan dalam menumbuhkan perilaku dan nilai-nilai pro lingkungan di kalangan masyarakat. Ini membahas berbagai teori dan model untuk memahami dan mempengaruhi sikap, norma, dan tindakan lingkungan. Buku ini memberikan wawasan tentang strategi komunikasi yang efektif dan pendekatan pedagogi untuk program pendidikan lingkungan. Hal ini menekankan perlunya menyesuaikan konten pendidikan dan metode penyampaiannya dengan konteks budaya dan karakteristik audiens tertentu.</p>	<p>Meskipun buku ini menyinggung faktor budaya dan psikologis, buku ini tidak memberikan analisis mendalam mengenai dinamika ekonomi politik, hubungan kekuasaan, dan kepentingan yang mengakar yang dapat menghambat atau memfasilitasi transisi keberlanjutan dalam konteks nasional yang berbeda.</p>
70.	Institutions, climate change and cultural theory: towards a common analytical framework	(O'riordan & Jordan, 1999)	Institusi Internasional	<p>O'Riordan memanfaatkan teori budaya untuk menganalisis bagaimana bias budaya yang berbeda (individualis, egaliter, hierarki, fatalis) memandang dan merespons risiko lingkungan seperti perubahan iklim. Pandangan dunia ini mempengaruhi jenis institusi dan pendekatan kebijakan yang dipilih untuk mengatasi risiko iklim. Makalah ini mengeksplorasi bagaimana lembaga-lembaga yang memiliki bias budaya yang berbeda melakukan pendekatan terhadap perubahan iklim, mulai dari solusi berbasis pasar (individualis) hingga peraturan negara (hierarki) hingga adaptasi berbasis komunitas (egaliter). Hal</p>	<p>Tata kelola lingkungan hidup global seringkali didominasi oleh lembaga-lembaga hierarkis yang berpusat pada negara dan pendekatan individualis berbasis pasar, sehingga meminggirkan model-model egaliter berbasis komunitas yang mungkin lebih relevan dalam konteks lokal tertentu seperti sektor ekstraktif di Indonesia. Inisiatif egaliter akar rumput yang bertujuan untuk mengembangkan alternatif</p>

				ini menyoroti ketegangan dan konflik yang dapat timbul antara logika kelembagaan yang saling bersaing.	berkelanjutan terhadap industri ekstraktif di Indonesia mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan yang memadai dalam arsitektur pendanaan iklim global saat ini yang didominasi oleh logika berbasis negara dan pasar.
71.	Neoliberalism And Climate Change	(David Miller, 1987)	Ekonomi politik internasional	Membahas pandangan Karl Marx tentang perubahan iklim dan hubungan sosialisme dengan isu lingkungan. Menyebutkan Manifesto Komunis karya Marx dan Engels, namun tidak memberikan ringkasan atau analisis apapun. Meringkas sebuah buku baru karya Kohei Saito yang menghubungkan ide-ide Marx dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun dan krisis ekologi, serta mengusulkan "perlambatan komunisme" sebagai solusinya.	Meskipun hasil-hasil penelitian ini menyentuh teori Marxis, komunisme, dan isu-isu lingkungan hidup, hasil-hasil penelitian ini tidak secara langsung mencakup karya David Miller atau tema yang disebutkan terkait dengan kebijakan mineral dan batubara Indonesia, investasi ramah lingkungan, dan teori tata kelola global. Tampaknya ada kesenjangan dalam membahas topik khusus ini.
72.	Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia?	(Universitas Paramadina, 2021)	Hukum	Revisi undang-undang ini memusatkan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara serta pengendalian produksi di bawah pemerintah pusat, sehingga menghilangkan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah dan DPR. Hal ini menyederhanakan proses perizinan dengan menggabungkan izin	dampak spesifik dari perubahan kebijakan ini terhadap daya tarik investasi ramah lingkungan dalam kerangka keuangan ramah lingkungan di Indonesia. Bagaimana revisi kebijakan mineral dan batubara dapat menghambat atau mendorong praktik

				<p>eksplorasi dan izin operasi menjadi satu izin, yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan menarik lebih banyak investasi di sektor pertambangan.</p> <p>Para pengkritik berpendapat bahwa proses revisi yang tergesa-gesa ini kurang transparan dan kurang konsultasi publik, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai pengaruh kepentingan pribadi terhadap undang-undang tersebut untuk menguntungkan kelompok bisnis pertambangan yang oligarki.</p>	<p>ramah lingkungan dan peluang pembiayaan ramah lingkungan.</p> <p>Implikasi dari perspektif teori tata kelola global terhadap kemampuan Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan pertambangannya dengan norma dan komitmen internasional terkait mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.</p>
73.	What Is Keynesian Economics?	(Jahan et al., 2014)	Ekonomi Politik Internasional	<p>Memberikan gambaran umum tentang jurnal <i>Review of Keynesian Economics</i>, yang menerbitkan penelitian tentang teori, kebijakan, dan analisis makroekonomi Keynesian. Mencantumkan artikel yang diterbitkan dalam jurnal <i>Review of Keynesian Economics</i>, yang mencakup topik-topik seperti relevansi pemikiran Keynesian, ekspektasi inflasi, teori suku bunga, dan variasi kapitalisme.</p> <p>Menjelaskan prinsip-prinsip inti perekonomian Keynesian, termasuk keyakinan tentang permintaan agregat, harga/upah yang kaku, tingkat pengangguran alami, dan kebijakan stabilisasi aktivis. Membahas evaluasi ilmu ekonomi Pasca-Keynesian sebagai aliran pemikiran, membandingkan asumsi, metodologi, dan model makroekonomi dengan</p>	<p>Meskipun hasil-hasil ini memberikan informasi latar belakang mengenai perekonomian Keynesian dan perdebatan terkait, hasil-hasil tersebut tidak secara spesifik mencakup penelitian tertentu atau tema yang disebutkan mengenai kebijakan mineral dan batubara Indonesia, kerangka investasi hijau, dan perspektif tata kelola global. Tampaknya ada kesenjangan dalam menangani topik ini secara langsung dalam hasil penelusuran yang diberikan.</p>

				tradisi ekonomi lain seperti ekonomi Neo-Keynesian dan Ekonomi Klasik Baru.	
74.	Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan Dan Ketahanan Nasional	(Subiyanto et al., 2018)	Keamanan	Kajian tersebut menganalisis korelasi perubahan iklim dengan terjadinya konflik/perang, serta dampak perubahan iklim terhadap ketahanan nasional di Indonesia. Argumentasinya adalah bahwa perubahan iklim tidak secara langsung berkontribusi terhadap konflik/perang, namun justru mengganggu kehidupan masyarakat sehingga menurunkan ketahanan nasional. Perubahan iklim dipandang sebagai gangguan dan/atau ancaman. Penelitian tersebut menjelaskan fenomena perubahan iklim dari perspektif teori ketahanan nasional, dan mengeksplorasi keterkaitan antara keamanan manusia dan ketahanan nasional. Para penulis menyarankan agar ketahanan nasional dan keamanan manusia dapat disinkronkan, karena keduanya bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan individu dalam menghadapi dampak perubahan iklim.	Dampak spesifik kebijakan hilirisasi mineral dan batubara Indonesia terhadap daya tarik investasi ramah lingkungan dalam kerangka keuangan ramah lingkungan. Bagaimana kebijakan pertambangan ini dapat memfasilitasi atau menghambat kemampuan Indonesia untuk memenuhi komitmen iklim dan transisi menuju perekonomian rendah karbon. Peran kerangka tata kelola global, seperti Perjanjian Paris atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dalam membentuk kebijakan mineral dan batubara Indonesia agar selaras dengan norma dan standar internasional untuk pembangunan berkelanjutan.
75.	Economic Policy, Institutions, and Capital Flows: Portfolio and Direct Investment Flows in Developing Countries	(Ahlquist, 2006)	Institusi internasional	Kebijakan dan institusi ekonomi di negara-negara berkembang secara signifikan mempengaruhi komposisi arus masuk modal yang mereka terima (investasi portofolio vs. FDI). Negara-negara dengan kebijakan makroekonomi yang lebih stabil (inflasi rendah, disiplin fiskal) dan kualitas	Meskipun karya Ahlquist menawarkan landasan teoretis yang relevan, analisis mendalam terhadap tema tersebut dari perspektif kebijakan pertambangan Indonesia dan tata kelola global

				<p>kelembagaan yang lebih kuat menarik lebih banyak penanaman modal asing dibandingkan aliran portofolio. Sebaliknya, negara-negara dengan inflasi yang lebih tinggi, defisit anggaran yang lebih besar, dan institusi yang lebih lemah mengalami arus masuk investasi portofolio yang lebih tinggi dibandingkan dengan FDI. Studi ini menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang sehat dan institusi yang kuat dalam membentuk profil risiko yang terkait dengan berbagai jenis aliran modal ke negara-negara berkembang.</p>	<p>keuangan ramah lingkungan tampaknya masih kurang dalam hasil penelitian ini.</p>
76.	Economic Statecraft: Finance And Money	(Norrlöf, 2021)	<i>Incentives Economic</i>	<p>Karya ini menyelidiki penggunaan strategis ilmu ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri non-ekonomi, khususnya berfokus pada peran alat keuangan dalam persaingan negara-negara besar. Dr. Norrlöf mengkaji bagaimana negara-negara besar menggunakan alat keuangan untuk membentuk tindakan masing-masing. Dia mencatat bahwa AS dan UE sering menggunakan paksaan finansial dan mata uang untuk mencegah kebijakan luar negeri yang tidak diinginkan, memanfaatkan posisi pasar dan mata uang dominan mereka. Sebaliknya, kekuatan global yang bersaing cenderung memanfaatkan insentif finansial untuk memperluas aliansi mereka.</p>	<p>Penelitian Norrlöf dapat menjelaskan hubungan kausal antara rezim dan konsep neoliberal dalam upaya Indonesia menarik investasi hijau, namun tidak dapat memvalidasi perilaku hilirisasi mineral lebih lanjut sebagai penghambat.</p>

77.	Economic Incentives Versus Command And Control What's The Best Approach For Solving Environmental Problems?	(Harrington & Morgenstern, 2004)	<i>Economic Incentives</i>	Winston Harrington dan Richard D. Morgenstern mengeksplorasi efektivitas komparatif dari dua metode utama untuk mengatasi masalah lingkungan: kebijakan insentif ekonomi (EI) dan komando dan kendali (CAC). Metode-metode ini mewakili pendekatan berbeda dalam mengatur perilaku lingkungan, dengan EI berfokus pada penciptaan manfaat ekonomi untuk mengurangi polusi, dan CAC melibatkan regulasi langsung dan penegakan batas emisi. ia mencatat bahwa sejak undang-undang lingkungan hidup pertama kali diberlakukan, para pembuat kebijakan harus bergulat dalam memilih berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pilihan antara mengenakan pajak kepada para pencemar atas emisi mereka atau menerapkan denda atas ketidakpatuhan terhadap standar emisi, atau memutuskan apakah badan pengawas harus menerapkan larangan atau mengawasi sistem izin yang dapat diperdagangkan, merupakan salah satu pertimbangan yang disoroti.	Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih lengkap terkait upaya Indonesia menarik investasi hijau dan keuntungan lainnya dalam mengikat diri dengan rezim Paris Agreement. Namun penelitian ini tidak dapat menjelaskan perilaku Indonesia dalam konsep economic nationalism dalam hilirisasi mineralnya.
-----	---	----------------------------------	----------------------------	---	--

Maka dari hasil tinjauan literatur dari 77 literatur pembandingan tidak ada satupun literatur yang memiliki kesamaan murni dari segi teoritis, konsep maupun studi empiris.

## 2.2. Kerangka Teoritis

### 2.2.1. *Foreign Policy in Economic Nationalism*

Economic Nationalism didasarkan pada konsep bahwa setiap negara harus berusaha memproduksi semua barang yang dibutuhkannya secara internal, berbeda dengan prinsip internasionalisme ekonomi (Schrecker, 1934). Masih dalam konsep dan asumsi yang sama, Robert Reich menegaskan bahwa *economic nationalism* erat dengan gagasan bahwa setiap negara harus mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas warganya, yang mengarah pada kemakmuran dan saling ketergantungan ekonomi dalam negara tersebut (Levi-Faur, 1997). *Economic nationalism* pada dasarnya berfokus pada memprioritaskan kepentingan ekonomi suatu negara di atas pertimbangan global, bahkan lebih ekstrem lagi, menekankan kebijakan proteksionis dan produksi dalam negeri (Levi-Faur, 1997). Namun di sisi lain, terdapat konsep *economic nationalism* yang lebih “ramah” dengan pergaulan di sistem internasional yang dikemukakan oleh Benjamin Cohen. Pada konsep *economic nationalism* Cohen, terdapat dua tipe yakni *benign* dan *malign*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada kesediaan negara untuk mengkompromikan kebijakan negaranya (kepentingan nasional) dengan kepentingan stabilitas pada sistem internasional.

Konsep daripada *economic nationalism* kemudian dapat mencerminkan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri suatu negara sebagaimana dijelaskan oleh Keohane besar dipengaruhi oleh ide. Keohane menekankan pentingnya ide dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Keohane membahas bagaimana gagasan mempengaruhi hasil politik dan kondisi di mana hal ini terjadi (Robert. Keohane & Goldstein, 1933). Ide, sebagaimana dibahas oleh Keohane, mengacu pada keyakinan, konsepsi, dan prinsip yang dipegang dan digunakan negara untuk membentuk pemahaman tentang dunia dan memandu tindakan mereka dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Robert. Keohane & Goldstein, 1933). Ada 3 faktor kausal yang kemudian menjelaskan bagaimana ide mempengaruhi perumusan suatu kebijakan, yakni menentukan preferensi, mempengaruhi interaksi strategis, dan menjadi terlembagakan untuk membatasi keputusan kebijakan suatu negara (Robert. Keohane & Goldstein, 1933).

Keohane menyinggung terkait kehadiran institusi dalam proses perumusan kebijakan yang dipengaruhi oleh ide. Institusi memiliki peran yang besar dalam melembagakan suatu ide. Ide membantu individu (aktor) mengatur dunia, membentuk agenda, dan mempengaruhi hasil dengan membatasi berbagai alternatif yang dipertimbangkan dan mengarahkan tindakan ke jalur tertentu (Robert. Keohane & Goldstein, 1933).

Asumsi tersebut kemudian dihubungkan dengan bagaimana program hilirisasi yang sedang masif dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah komitmen terhadap isu perubahan iklim. Keputusan hilirisasi tersebut kemudian menjadi menarik ketika disandingkan dengan upaya *green transformation*. Biaya mahal dalam membangun ekosistem industri yang berbasis ramah lingkungan terlihat kontraproduktif dengan upaya pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu keputusan politik terasa kental di tengah kepentingan akan memitigasi perubahan iklim, dikarenakan sudah menjadi hal wajib bagi pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam menahan laju perubahan iklim sebagai amanah daripada ratifikasi Perjanjian Paris. *Economic Nationalism* dapat menjelaskan hal tersebut, berdasar pada keyakinan bahwa keputusan ekonomi harus didorong oleh pertimbangan politik, yang mengarah pada pergeseran dari faktor ekonomi dan teknis semata ke faktor politik dalam membentuk kebijakan ekonomi (Schrecker, 1934).

Pada dasarnya upaya untuk menumbuhkan perekonomian nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut merupakan praktik yang ideal. Daniele Conversi menjelaskan dengan konsep *resource nationalism*. Dalam konsep tersebut, Conversi menerangkan bahwa memang jika dihadapkan dengan agenda perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya nasional, utamanya tambang, menjadi dilema bagi suatu negara (Conversi, 2020). Namun jika dipandang melalui konsep *economic nationalism*, agenda lingkungan tidak semata-merta dapat mendikte perilaku negara, terlebih menyangkut upaya meningkatkan pembangunan nasional. Dalam karya yang sama, Conversi memberikan konsep yang berlawanan dengan *resource nationalism*, yakni *green nationalism*. Meskipun konsep ini tidak atau jarang sekali ditemui dengan

perwakilan pemerintah seutuhnya, namun konsep *green nationalism* efektif dalam mengkampanyekan hal-hal terkait perubahan iklim. *green nationalism* mewakili bentuk nasionalisme yang lebih peduli, berdedikasi, dan efisien dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, berbeda dengan narasi nasionalis tradisional yang sering menghambat aksi iklim yang komprehensif (Conversi, 2020).

Negara dalam merespon hadirnya agenda perubahan iklim dirasa perlu untuk dapat menyesuaikan agenda nasionalnya dengan dinamika isu perubahan iklim pada level internasional. Maka dalam konteks mitigasi perubahan iklim pada level internasional negara dirasa perlu untuk merumuskannya kedalam kebijakan luar negeri. Paul Harris mengenalkan satu konsep yang bisa menganalisa lebih komprehensif terkait keterkaitan antara perumusan kebijakan luar negeri dengan isu lingkungan. Kebijakan luar negeri lingkungan hidup bertujuan untuk memahami interaksi antara politik domestik dan internasional, serta peran berbagai aktor dan institusi dalam membentuk tindakan lingkungan hidup dalam skala global. karya dari John Harris tersebut berupaya menyoroti upaya internasional untuk memitigasi dampak lingkungan dan mendorong praktik berkelanjutan baik di negara maju maupun berkembang. Dinamika mitigasi perubahan iklim tidak sama di setiap negara, terdapat faktor-faktor yang sangat menentukan sikap dan respon negara terhadap pengentasan perubahan iklim. Di antara faktor-fakto tersebut ada satu yang cukup relevan dengan penelitian ini yakni terkait agenda kepentingan nasional.

Indonesia di tengah komitmennya terhadap rezim Paris Agreement, dihadapi dengan dilema pemanfaatan sumber daya tambangnya. Menjadi salah satu penyumbang APBN terbesar menjadikan Indonesia tidak mungkin berpaling dari godaaan hilirisasi minerba. Meskipun apa yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut dapat dibenarkan melalui konsep *economic nationalism* Schrecker dan konsep *resource nationalism* Conversi, namun Indonesia harus berpegang teguh pada komitmen lingkungannya. Biaya mahal transformasi hijau dapat dibantu dengan adanya mekanisme investasi hijau, tetapi jika pemerintah tidak mengindikasikan komitmen yang kuat terhadap reputasi negara dalam menarik investasi hijau, maka tantangan untuk menciptakan iklim ekonomi berkelanjutan yang sehat di Indonesia akan semakin sulit untuk direalisasikan.

Indonesia dinilai harus cepat menyesuaikan kebijakan luar negerinya guna memperbesar ketertarikan para investor untuk memberikan bantuan pendanaan melalui *green investment*. Kebijakan luar negeri signifikan dipengaruhi oleh gagasan dan keyakinan yang dianut oleh pembuat kebijakan dan masyarakat luas (Robert. Keohane & Goldstein, 1993). Namun secara tradisional kebijakan luar negeri didorong oleh kepentingan pribadi (*national interest*) atau perhitungan strategis para aktor utama.

Maka, perpaduan antara konsep *economic nationalism* Schrecker dan pandangan tradisional kebijakan luar negeri, menjadikan program hilirisasi Indonesia di tengah upaya menurunkan emisi karbon terkesan rasional. Namun, karena hadirnya tekanan akan ide dan gagasan akan isu lingkungan pada sistem internasional, maka mengharuskan Indonesia menyesuaikan kebijakan luar negerinya, hal tersebut juga dibuktikan dengan peratifikasian *Paris Agreement*. Maka apa yang Keohane kemukakan terkait bagaimana ide mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, terjustifikasi dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk aktif menyusun kerangka kerja menyambut transformasi hijau meskipun dihantui dengan beratnya membangun perekonomian nasional.

### **2.2.2. Economic Incentives in neo-liberalism**

Neoliberalisme, sebagaimana didefinisikan oleh Keohane dan Nye, adalah kerangka teoritis yang menyoroti potensi kerja sama internasional dan peran penting lembaga-lembaga internasional dalam mengelola tantangan global. Hal ini memberikan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana negara-negara dapat menavigasi kompleksitas sistem internasional untuk mencapai keuntungan bersama dan mengatasi tantangan bersama (Colebourne, 2012). Neoliberalisme, sebagaimana dikonsepsi oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, merupakan sintesis realisme dan liberalisme, yang bertujuan untuk memahami dinamika hubungan internasional melalui lensa saling ketergantungan dan peran lembaga internasional. Perspektif ini didasarkan pada keyakinan bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, kerja sama antar negara tidak hanya mungkin dilakukan tetapi juga penting untuk mengatasi tantangan global.

Memfaatkan interdependensi yang terbangun atas dasar konsep neoliberalisme, maka *economic incentives* dapat memberikan kerangka konseptual dalam mengimplementasikan bantuan yang didapatkan negara dengan berinteraksi dalam suatu sistem internasional. *economic incentives* mengacu pada imbalan atau manfaat yang ditawarkan untuk mendorong perilaku atau tindakan tertentu oleh individu, organisasi, atau negara (Norrlöf, 2021). Dalam *economic statecraft*, *incentives* digunakan untuk mempengaruhi perilaku pelaku lain dengan menawarkan manfaat atau peluang ekonomi sebagai imbalan atas hasil yang diinginkan. Hasil di sini berarti upaya atas pengentasan perubahan iklim. Insentif yang ditawarkan ini sekaligus menjawab tantangan negara akan dilema membangun pertumbuhan ekonomi negara ketika dihadapi dengan ide transformasi hijau.

Ketika dihadapkan dengan isu perubahan iklim yang mana notabene merupakan salah satu isu kontemporer yang mewarnai dinamika hubungan internasional, maka fokus daripada upaya aktor-aktor internasional adalah bagaimana melakukan usaha kolektif dalam sistem internasional. Aktor baik *state* maupun *non-state* berjibaku melakukan segala daya upaya guna merumuskan mitigasi dan *action plan* guna menghambat perubahan iklim. Dalam memandang katastrofi perubahan iklim, satu daripada banyak permasalahan yang dihadapi ada pada sektor ekonomi. Neo-liberalisme menekankan konsep-konsep seperti struktur kekuasaan, *interdependence*, dan peran institusi dalam membentuk hubungan internasional, menawarkan pemahaman yang lebih beragam tentang politik global (Baldwin, 2016). Tidak seperti *realist*, neo-liberalis mengedepankan *soft-power* dalam tindakannya. *Soft power* menurut Nye adalah kemampuan untuk mengubah apa yang diinginkan orang lain, berbeda dengan *command power* yaitu kemampuan untuk mengubah apa yang dilakukan orang lain (Baldwin, 2016). Dalam konteks perubahan iklim, sejalan dengan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana institusi internasional berperan aktif bersama negara-negara, atau dalam kasus ini adalah Indonesia dalam menyiapkan kerangka finansial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Neo-liberalisme oleh Nye ini didasarkan pada konsep *soft power* menekankan pentingnya daya tarik dibandingkan paksaan

dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam hubungan internasional (Baldwin, 2016).

Ekonomi dalam perubahan iklim dalam sudut pandang neo-liberalisme diartikan sebagai upaya melihat keuntungan daripada konsep neo-liberalisme yang lebih efisien dan ditandai dengan pasar bebas serta minimnya keterlibatan pemerintah, sehingga berdampak pada perubahan iklim dalam berbagai cara (Hans, 2024). Strategi seperti penetapan harga karbon dan perdagangan emisi dianjurkan untuk memberikan insentif kepada perusahaan agar mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Beberapa *schoolars* seperti Dr. Basil Hans berpendapat bahwa mekanisme pasar dapat menawarkan solusi yang efisien dan hemat biaya untuk mengatasi tantangan perubahan iklim (Hans, 2024). Hubungan antara neoliberalisme dan perubahan iklim menimbulkan kemungkinan tentang keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ketika negara tidak lagi terpaku pada pertumbuhan ekonomi nasionalnya saja tanpa berkompromi dengan sistem internasional, maka disitulah neoliberalisme dapat mewartakan proses menuju tatanan dunia yang lebih ramah lingkungan. Dikarenakan ekonomi adalah sektor yang paling fundamental dalam mengentaskan isu perubahan iklim, maka konsep *climate change economics in neo-liberalism* adalah cara pandang yang komprehensif untuk menjawab tantangan dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan *interdependency* dalam sistem internasional.

Indonesia yang sudah tergabung dalam forum internasional bahkan sudah meratifikasi Perjanjian Paris, dianggap sudah cukup berkomitmen dengan upaya pengentasan perubahan iklim. Meskipun pada praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, namun arah kebijakan pemerintah sejak meratifikasi Perjanjian Paris terus mengindikasikan komitmen terhadap upaya *reducing carbon* menuju *nett-zero emissions*. Dalam perumusan kebijakan luar negerinya, sejauh ini Indonesia belum ada tanda-tanda akan mundur dari Perjanjian Paris dan forum-forum perubahan iklim internasional lainnya seperti COP. Indonesia di kawasan asia tenggara pun cukup aktif merumuskan strategi-strategi menuju ekonomi berkelanjutan.

### ***Green Finance to fostering Green Transformations***

*Green Finance* merupakan sebuah konsep ekonomi baru dan masih berkembang secara studi literatur maupun perkembangan. Mengutip laporan ADBI, *green finance* dapat digambarkan secara luas sebagai semua kegiatan yang mencakup instrumen finansial di dalamnya, dan kebijakan yang mencakup upaya pembangunan berkelanjutan seperti ‘obligasi hijau, bank hijau, instrumen pasar karbon, kebijakan fiskal, bank sentral hijau’ dan lain sebagainya (Sachs, Woo, Yoshino, & Taghizadeh-Hesary, 2019). Laporan G20 di tahun 2016 juga menggambarkan hal serupa di mana *green finance* adalah ‘pembiayaan investasi yang menyediakan manfaat lingkungan dalam konsep luas pembangunan berkelanjutan (G20 Green Finance Study Group, 2016).

Kerangka kerja *green finance* pada akhirnya berguna sebagai fondasi dalam menerapkan transformasi hijau di Indonesia. Ketika berbicara transformasi hijau, maka peruan fundamental diterapkan dalam melakukan pembangunan nasional baik dari *private sector*, maupun pemerintah. Transformasi hijau berperan sentral dalam isu perubahan iklim pada sektor ekonomi. Salah satu bentuknya adalah transisi energi. Dalam prosesnya, dinamika politik transformasi hijau dipengaruhi oleh efek umpan balik dan konteks kelembagaan. Hubungan antara penyedia energi, pembuat kebijakan, dan pengguna energi menentukan investasi, perubahan teknologi, dan hasil seperti emisi gas rumah kaca. Maka guna menyediakan kerangka transisi energi yang memadai, pemerintah memerlukan bantuan pendanaan melalui *green investment*. Sayangnya, pemerintah Indonesia masih belum cekatan dalam merumuskan strategi ini. Ditandai dengan masifnya program hilirisasi minerba. Hal tersebut tentu berpengaruh kepada investor yang menekankan sekali reputasi negara tujuan dalam menanamkan modalnya.

#### **2.2.3. Global Governance Theory in International Regime**

*Global Governance* didasarkan pada asumsi bahwa lembaga-lembaga tata kelola global memperoleh otoritas melalui rasa hormat yang refleksif, bukan hanya melalui logika rasional atau normatif (Fioretos & Tallberg, 2021). Dalam konteks teori *Global Governance*, penghormatan refleksif mengacu pada tindakan negara dan

aktor internasional yang menerima peraturan dan norma global tidak semata-mata berdasarkan logika rasional atau normatif, namun lebih karena mengakui keterbatasan mereka dalam memahami dan mengatasi tantangan global. Dalam teori tata kelola global atau *global governance*, Michael Zürn menjabarkan 3 indikator dalam mengelaborasi teori ini, yakni legitimasi, otoritas dan kontestasi. Teori ini menyoroti pentingnya legitimasi dalam pemerintahan global. Legitimasi berasal dari penerimaan aturan dan norma oleh mereka yang tunduk padanya. Zürn mengidentifikasi beberapa sumber legitimasi, termasuk persetujuan, paksaan, dan pembiasaan, serta membahas bagaimana sumber-sumber ini berinteraksi dalam sistem tata kelola global. Zürn berpendapat bahwa tata kelola global juga dicirikan oleh struktur hierarki, di mana aktor-aktor tertentu memiliki otoritas atas aktor-aktor lain. Hierarki ini tidak bersifat statis namun berkembang seiring berjalannya waktu, mencerminkan perubahan dinamika kekuasaan antara negara dan aktor non-negara. Sedangkan kontestasi mengacu pada perjuangan berkelanjutan atas interpretasi dan implementasi norma dan aturan tata kelola global. Kontestasi muncul dari ketidaksetaraan dan disparitas kekuasaan yang melekat dalam sistem pemerintahan global, sehingga menimbulkan resistensi dan upaya untuk mendefinisikan ulang parameter sistem tersebut.

Berbicara lebih lanjut mengenai otoritas dan legitimasi dalam institusi internasional, Krasner di sisi lain memiliki penjabaran lebih lanjut mengenai bagaimana kemudian rezim internasional memainkan peran dalam sistem internasional. Menurut Krasner, rezim internasional ditentukan oleh prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi aktor dalam bidang isu tertentu. Rezim-rezim ini bertindak sebagai variabel intervening, yang memediasi antara faktor-faktor penyebab mendasar dan perilaku serta hasil yang dihasilkan (Krasner, 1982). Dalam konteks perubahan iklim, negara diikat dalam kerangka kerja rezim internasional. Hal tersebut dikarenakan rezim memiliki skema kerja yang dapat didefinisikan sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi aktor dalam bidang isu tertentu (Krasner, 1982). Rezim dapat menjadi medium antara kepentingan negara dan aktor internasional lainnya dalam membentuk satu perilaku baru, yang

kemudian jika diimplementasikan dalam isu lingkungan dapat berujung pada usaha bersama menurunkan emisi karbon. Rezim dipandang dalam sistem internasional terkait erat dengan perilaku. Rezim dirasa penting untuk mempertahankan perilaku yang terpola dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan negara dipengaruhi oleh kehadiran rezim di berbagai bidang permasalahan (Krasner, 1982).

Di samping itu, Ikenberry meyoroti pula terkait pengaruh kekuasaan dominasi pada eksistensi rezim internasional. Ikenberry memberikan empat indikator terkait bagaimana *dominant power* dapat mempengaruhi rezim, yakni *creation, maintenance, enforcement, dan durability*. Dari sudut pandang rezim oleh Ikenberry, dapat dianalisa bahwa memang dalam perumusan hingga penerapan rezim *Paris Agreement* besar dipengaruhi oleh aktor-aktor dominan seperti *Greenpeace* dan kelompok ilmuwan lainnya dalam mendesak percepatan penanganan perubahan iklim (Ikenberry, 1998). Di sisi lain, negara seperti Amerika Serikat juga terlibat aktif dalam perumusan awal gerakan perubahan iklim dalam sistem internasional, meskipun AS sempat keluar dari Perjanjian Paris. Dukungan hegemon tersebut mungkin bersifat konstruktif bagi rezim tersebut, namun menghadirkan tantangan bagi para pembuat kebijakan yang mengembangkan perjanjian tersebut. Di satu sisi, hal ini dapat menguntungkan dan melestarikan kekuatan hegemonik dengan memproyeksikan pengaruhnya melalui institusi, sehingga menciptakan insentif untuk berpartisipasi dalam rezim (Ikenberry, 2000). Maka kerangka rezim oleh Ikenberry dapat memvalidasi bahwa ketika suatu negara mengikat diri terhadap rezim internasional pada bidang tertentu, terdapat insentif yang akan menguntungkan partisipasi negara dalam rezim tersebut, meskipun dalam prosesnya kuat dipengaruhi oleh kekuasaan yang lebih dominan.

Tantangan global pada penelitian ini adalah isu perubahan iklim, di mana Indonesia sebagai aktor dalam sistem internasional merasa perlu berada dalam barisan yang menjunjung norma lingkungan dibuktikan dengan meratifikasi rezim *Paris Agreement*. Indonesia di sisi lain memiliki keterbatasan dalam merespon isu perubahan iklim, disamping faktor lainnya, adalah karena hadirnya program hilirisasi minerba. Penghormatan refleksif menyiratkan suatu bentuk pengakuan

dan penerimaan otoritas lembaga pemerintahan global berdasarkan pengakuan atas keahlian dan legitimasi yang tertanam dalam struktur tersebut (Fioretos & Tallberg, 2021). Penghormatan reflektif diartikan sebagai bentuk keterbatasan negara akan kompleksitas tantangan global sehingga membutuhkan satu otoritas yang terlegitimasi dalam tata kelola global melalui sebuah institusi yang dilakukan secara kolektif dengan aktor internasional lainnya. Namun bentuk kepatuhan reflektif tersebut tidak semata-mata menjadikan aktor internasional dapat berjalan beriringan tanpa ada hambatan. *Global governance* juga menyoroti hadirnya kontestasi. Kontestasi dalam *global governance* mengacu pada perlawanan aktif, oposisi, atau tantangan yang ditimbulkan oleh berbagai aktor negara dan non-negara terhadap tatanan kelembagaan dan norma-norma tata kelola global yang berlaku (Fioretos & Tallberg, 2021). Dalam konteks isu perubahan iklim, kontestasi ini erat kaitannya dengan fenomena bantuan pendanaan dalam misi membantu negara-negara berkembang untuk tetap dapat melakukan pembangunan nasional dengan tetap berdasarkan ide-ide keberlanjutan. Sedangkan dalam konteks legitimasi dan otoritas, Indonesia mengakui adanya ide yang terlembagakan dalam wujud rezim *Paris Agreement*, yang mana jelas sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia dengan dibuktikan melalui ratifikasi Perjanjian Paris tersebut. Maka dalam konteks *global governance theory* maupun rezim internasional, Indonesia dapat dibuktikan rasional tindakannya atas komitmen terhadap rezim *Paris Agreement*.

### **2.3. Asumsi**

Isu perubahan iklim jika dikaji menggunakan praktik ekonomi politik internasional, maka menimbulkan berbagai macam kompleksitas dalam penanganannya, pun di sisi lain memberikan pemahaman utuh mengenai permasalahan mendasar dari penanganan perubahan iklim dalam konteks hubungan internasional. Mitigasi perubahan iklim yang memerlukan upaya kolektif aktor internasional, dibalut dengan adu kepentingan nasional antar *state* dan upaya menegakkan legitimasi institusi, lembaga serta rezim internasional dalam prosesnya, menjadikan misi menahan laju perubahan iklim kian kompleks. Hal

tersebut tercermin dari bagaimana pemerintah Indonesia di tengah upaya menahan laju produksi karbon guna mencegah memburuknya perubahan iklim, justru aktif menggenjot aktifitas tambangnya melalui program hilirisasi minerba. Bukan hanya bermasalah dalam konteks kelola hilirisasi, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kemudian hilirisasi minerba ini terkesan kontraproduktif dengan upaya penurunan produksi emisi karbon. Namun Indonesia juga patut mengambil langkah yang rasional utamanya dalam memprioritaskan kepentingan nasionalnya dalam wujud pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan peluang yang besar di bidang tambang, tentu peluang tersebut tidak mungkin dilewatkan, terlebih manfaat yang besar bagi Indonesia untuk menguatkan eksistensinya dalam dinamika ekonomi politik internasional. Maka keputusan pemerintah untuk tetap aktif melakukan hilirisasi minerba di tengah upaya menarik investasi hijau sebagai modal transformasi hijau dinilai rasional. Indonesia harus mampu mencari jalur akseleratif di antara dua agenda yang pada dasarnya berseberangan, yakni komitmen terhadap mandat *Paris Agreement*, di lain sisi, menumbuhkan perekonomian nasional melalui hilirisasi minerba.

## 2.4. Kerangka Analisis

*Kebijakan Hilirisasi Minerba Sebagai Penghambat Indonesia Menarik Green Investment dalam Kerangka Green Finance ditinjau dari Global Governance Theory*

